

MANAJEMEN EKONOMI SYARIAH: PRINSIP, PRAKTIK, DAN IMPLEMENTASI

**Fida Arumingtyas
Arief Yanto Rukmana
Sri Nawatmi
Aminah Lubis
Alamsyah Aigit
Agung Nusantara**



GET PRESS INDONESIA

MANAJEMEN EKONOMI SYARIAH: PRINSIP, PRAKTIK, DAN IMPLEMENTASI

Penulis :

Fida Arumingtyas
Arief Yanto Rukmana
Sri Nawatmi
Aminah Lubis
Alamsyah Aigit
Agung Nusantara

ISBN :

Editor : Diana Purnama Sari,. S.E M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni,S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, November 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Manajemen Ekonomi Syariah: Prinsip, Praktik, Dan Implementasi ini.

Buku ini membahas Pengantar manajemen, Konsep dasar ekonomi syariah, Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, Ekonomi Syariah dan Pembangunan Ekonomi, Prospek dan Pengembangan Ekonomi Syariah.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENGANTAR MANAJEMEN.....	1
1.1 Sejarah Pentingnya Manajemen	1
1.2 Pengertian Manajemen	9
1.3 Fungsi Manajemen	11
1.4 Unsur-Unsur Manajemen.....	12
1.5 Prinsip-Prinsip Manajemen.....	14
1.6 Bidang-Bidang Manajemen.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	30
BAB 2 KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH.....	33
2.1 Pendahuluan	33
2.2 Landasan Ekonomi Islam	35
2.3 Agen Ekonomi dalam Ekonomi Islam	37
2.4 Konsep Ekonomi dalam Ekonomi Islam	39
2.5 Lembaga Ekonomi Islam	41
2.6 Tantangan dan Solusi Kontemporer.....	43
2.7 Studi Kasus dan Contohnya	44
DAFTAR PUSTAKA.....	47
BAB 3 PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH.....	53
3.1 Pendahuluan	53
3.2 Nilai-Nilai Dari Sistem Perekonomian Syariah Islam	58
3.3 Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah	63
3.4 Penutup	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
BAB 4 MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH	69
4.1 Pendahuluan	69
4.2 Teori Manajemen Keuangan Syariah	70
4.2.1 Pengertian Manajemen Keuangan Syariah	70
4.2.2 Esensi Manajemen Keuangan Syariah.....	71
4.2.3 Karakteristik Manajemen Keuangan Syariah	72

4.2.4 Fungsi manajemen keuangan syariah.....	73
4.2.5 Konsep Manajemen Keuangan Syariah	74
4.2.6 Prinsip Manajemen Keuangan Syariah.....	77
4.2.7 Prinsip Keuangan Syariah.....	80
4.2.8 Peranan Manajemen Keuangan.....	82
4.3 Kesimpulan.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
BAB 5 EKONOMI SYARIAH DAN	
PEMBANGUNAN EKONOMI	87
5.1 Pentingnya Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi.....	87
5.1.1 Kontribusi dan Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan.....	87
5.1.2 Dampak Positif Ekonomi Syariah.....	89
5.2 Tantangan dan Hambatan Implementasi Ekonomi Syariah	90
5.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Syariah.....	92
5.2.2 Tantangan dalam Ekonomi Syariah	94
5.2.3 Kendala Sosial dan Budaya dalam Ekonomi Syariah	95
5.3 Peningkatan Efektivitas Ekonomi Syariah dalam Pembangunan.....	97
5.3.1 Perbaikan Aspek Ekonomi Syariah	98
5.3.2 Pengembangan Lembaga Ekonomi Syariah	100
DAFTAR PUSTAKA	102
BAB 6 EKONOMI SYARIAH: MEMBANGUN	
KEBERLANJUTAN FINANSIAL DI ERA GLOBAL	105
6.1 Pendahuluan.....	105
6.2 Kontribusi Kelembagaan Keuangan Syariah.....	107
6.3 Teknologi dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Syariah	109
6.4 Tantangan dan Peluang untuk Pengembangan Ekonomi Syariah di Masa Depan ...	111

6.5 Kesimpulan	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
BIODATA PENULIS	

BAB 1

PENGANTAR MANAJEMEN

Oleh Fida Arumingtyas

1.1 Sejarah Pentingnya Manajemen

Melakukan analisis komprehensif atas pekerjaan yang mencakup keseluruhan peradaban manusia adalah tugas berat, yang ditandai dengan keluasan dan cakupan yang luas. Demikian pula, asal muasal kapan pekerja manusia pertama kali menerapkan strategi manajemen untuk mencapai tujuannya masih belum jelas. Satu-satunya bukti keberadaan kegiatan ini adalah ketika pertama kali terdokumentasi dalam catatan sejarah. Di kalangan ilmuwan sudah diterima secara luas bahwa manusia telah menerapkan praktik manajemen dalam pekerjaan mereka selama ribuan tahun. Asal usul gagasan ini muncul ketika para ilmuwan terlibat dalam kontemplasi mendalam mengenai struktur piramida di Mesir. Menurut catatan sejarah, pembangunan piramida dilaporkan membutuhkan tenaga kerja lebih dari seratus ribu orang dan memakan waktu dua dekade hingga selesai.

Dengan tidak adanya pengawas yang ditunjuk, yang nomenklaturnya masih belum pasti, prospek integritas struktural Piramida Giza tampaknya tidak dapat diatasi. Untuk membangun struktur yang belum sempurna, sangatlah penting untuk memiliki seorang mandor dan supervisor yang dapat secara efektif mengawasi dan membimbing angkatan kerja. Informasi sejarah tambahan mengenai kota Venesia yang terletak di Italia dapat dicermati. Selama abad ke-15, kota ini muncul sebagai pusat kegiatan ekonomi dan komersial di Eropa. Penduduk

wilayah perkotaan melakukan upaya-upaya yang memerlukan administrasi yang efektif. Beberapa perusahaan di kota ini telah menerapkan sistem jalur perakitan serupa dengan yang dipelopori oleh Henry Ford dengan tujuan merakit produk mereka secara efisien. Kerangka operasional mencakup sistem penyimpanan, yang mengawasi inventaris di dalam gudang, sistem manajemen sumber daya manusia, yang bertanggung jawab atas administrasi personalia, dan sistem akuntansi, yang bertugas melakukan pencatatan keuangan. Daniel Wren mengkategorikan perkembangan pemikiran manajemen ke dalam empat tahapan tersendiri, yaitu:

1. Pemikiran awal

Dua kejadian penting telah terjadi dalam bidang ilmu manajemen sebelum abad ke-20. Pada tahun 1776, peristiwa perdananya terjadi dengan diterbitkannya risalah ekonomi penting Adam Smith, *The Wealth of Nations*. Penulis buku ini menyoroti manfaat ekonomi yang dapat diperoleh organisasi melalui penggunaan pembagian kerja, yang melibatkan pembagian pekerjaan menjadi aktivitas yang terspesialisasi dan berulang. Smith (2021) memberikan studi kasus ilustratif tentang sektor manufaktur peniti, menyoroti potensi produktivitas perusahaan peniti yang mempekerjakan sepuluh orang, masing-masing ditugaskan pada tugas khusus. Menurut analisis Smith, konfigurasi seperti itu mungkin menghasilkan perkiraan keluaran produksi harian sekitar 48.000 peniti. Namun demikian, jika setiap individu secara mandiri melakukan penyelesaian setiap komponen tugas, akan sangat diharapkan jika mereka mampu menghasilkan total dua puluh pin per hari. Menurut temuan Smith, penerapan pembagian kerja berpotensi meningkatkan produktivitas melalui banyak

mekanisme: pertama, dengan meningkatkan kemahiran dan keahlian masing-masing pekerja; kedua, dengan meminimalkan waktu yang hilang selama peralihan pekerjaan; dan ketiga, dengan memfasilitasi pengembangan teknologi hemat tenaga kerja dan inovasi lainnya.

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kemajuan ilmu manajemen adalah terjadinya Revolusi Industri di Inggris. Munculnya Revolusi Industri menandai dimulainya mekanisasi, menggantikan tenaga kerja manusia dan selanjutnya mengarah pada relokasi proses industri dari lingkungan domestik ke tempat-tempat khusus yang biasa disebut sebagai “pabrik”. Transisi ini menyebabkan kebutuhan bagi para manajer pada era tersebut untuk mencari teori yang dapat membantu dalam prediksi permintaan, menjamin pasokan bahan mentah yang cukup, mendelegasikan tugas kepada bawahan, dan mengawasi operasi sehari-hari. Oleh karena itu, bidang ilmu manajemen mulai digeluti oleh para profesional yang berilmu.

2. Era manajemen ilmiah

Periode yang dipertimbangkan ditandai dengan kemunculan dan kemajuan ilmu manajemen, yang dipelopori oleh para insinyur terkemuka termasuk Henry Towne, Frederick Winslow Taylor, Frederick A. Halsey, dan Harrington Emerson. Konsep manajemen ilmiah menjadi terkenal melalui karya berpengaruh Frederick Winslow Taylor, yang menguraikannya dalam publikasi penting, "Principles of Scientific Management," yang dirilis pada tahun 1911. Taylor (1911) mendefinisikan manajemen ilmiah sebagai penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan metodologi untuk memastikan pendekatan optimal untuk menyelesaikan

suatu tugas. Kelahiran teori manajemen modern dianggap oleh berbagai penulis, termasuk Stephen Robbins, bertepatan dengan tahun penerbitan buku ini. Munculnya ide-ide baru dari Henry Gantt dan keluarga Gilberth juga berperan penting dalam mendorong perkembangan manajemen ilmiah. Henry Gantt, yang pernah berkolaborasi dengan Taylor selama masa jabatan mereka di Midvale Steel Company, mengusulkan konsep bahwa seorang mandor harus memiliki kemampuan untuk mengajar dan membina tenaga kerja yang berdedikasi dan kooperatif. Selain itu, ia merancang alat grafis yang dikenal sebagai bagan Gantt, yang berfungsi sebagai sarana untuk mengatur dan mengawasi tugas-tugas proyek dalam kerangka manajemen. Secara paralel, upaya kolaboratif Frank dan Lillian Gilbreth menghasilkan pencapaian yang signifikan dalam pengembangan gerakan mikro, sebuah instrumen teknologi yang mampu menangkap dan mengukur keseluruhan pergerakan karyawan serta durasi temporal yang terkait dengan setiap gerakan individu. Alat ini digunakan untuk membangun sistem produksi yang beroperasi dengan peningkatan efisiensi.

Era tersebut ditandai dengan masuknya teori administrasi, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab manajer, serta strategi untuk menerapkan praktik manajemen yang efektif. Pada awal abad ke-20, Henri Fayol, seorang industrialis Perancis, memperkenalkan kerangka konseptual yang terdiri dari lima fungsi utama manajemen: desain, organisasi, komando, koordinasi, dan kontrol. Konsep Fayol kemudian mendapatkan daya tarik sebagai kerangka dasar dalam buku teks ilmu manajemen sekitar pertengahan tahun 1950an, dan masih bertahan hingga saat ini. Selain itu, Henry Fayol memperkenalkan

serangkaian 14 konsep manajemen yang berfungsi sebagai prinsip dasar dan prinsip panduan untuk manajemen yang efektif.

Max Weber, seorang sosiolog Jerman terkemuka, memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ini. Weber menjelaskan konstruksi pola dasar organisasi yang dikenal sebagai bentuk organisasi birokrasi, yang dibedakan berdasarkan pembagian kerja, hierarki yang terdefinisi dengan baik, aturan dan regulasi yang jelas, dan banyak interaksi impersonal. Meskipun demikian, Weber mengakui tidak adanya konstruksi teoretis tentang "birokrasi ideal" dalam konteks praktis. Penulis memberikan gambaran tentang model organisasi khusus ini, dengan tujuan untuk menggunakannya sebagai landasan eksplorasi teoritis tentang dinamika aktivitas kelompok berskala besar. Ide yang ia usulkan berfungsi sebagai ilustrasi menonjol dari prinsip-prinsip desain struktural yang digunakan oleh banyak organisasi skala besar kontemporer.

Pada tahun 1940-an, kemajuan penting muncul dengan ditetapkannya riset operasi sebagai suatu disiplin ilmu oleh Patrick Blackett. Bidang ini mewakili perpaduan teori statistik dan teori mikroekonomi. Riset operasi, juga disebut sebagai "manajemen sains", bertujuan untuk menerapkan metode sistematis dan ilmiah untuk mengatasi masalah manajemen, khususnya di bidang logistik dan operasi. Pada tahun 1946, Peter F. Drucker, seorang tokoh terkemuka yang dikenal luas sebagai Bapak Ilmu Manajemen, menulis sebuah karya penting berjudul "*Concept of the Corporation*," yang merupakan salah satu publikasi paling awal tentang penerapan praktis prinsip-prinsip manajemen. Asal usul karya sastra ini dapat ditelusuri kembali ke konseptualisasi Alfred Sloan, ketua

terhormat General Motors, yang memprakarsai upaya penelitian yang berfokus pada studi struktur organisasi.

3. Era manusia sosial

Munculnya aliran perilaku dalam pemikiran manajemen menjelang berakhirnya periode manajemen ilmiah menandakan dimulainya era sosial kemanusiaan. Aliran pemikiran perilaku tidak diterima secara luas sampai tahun 1930-an. Lahirnya aliran perilaku sebagian besar dapat dikaitkan dengan serangkaian proyek penelitian yang biasa disebut eksperimen Hawthorne.

Eksperimen Hawthorne dilakukan selama periode 1920-an hingga 1930-an di Pabrik Hawthorne di Western Electric Company Works, yang berlokasi di Cicero, Illinois. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak tingkat pencahayaan yang berbeda terhadap produktivitas kerja. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti posisi, jam kerja, waktu istirahat, dan remunerasi memiliki dampak yang lebih lemah terhadap produktivitas pekerja jika dibandingkan dengan pengaruh tekanan kelompok, penerimaan kelompok, dan rasa aman yang terkait. Pengaruh terbesar terhadap perilaku kerja individu, menurut peneliti, adalah norma sosial atau standar kelompok.

Mary Parker Follett juga memberikan kontribusi yang signifikan. Follett (1868–1933), seorang sarjana dengan latar belakang filsafat dan ilmu politik, menjadi terkenal setelah penerbitan karyanya yang berjudul *Creative Experience* pada tahun 1924. Follett mengembangkan filosofi perusahaan yang menganjurkan prioritas integrasi sebagai sarana untuk mengurangi konflik tanpa menggunakan kompromi atau dominasi. Menurut Follett, tanggung jawab utama

seorang pemimpin adalah memastikan tujuan organisasi dan secara efektif menyelaraskannya dengan ambisi individu dan kolektif para anggotanya. Dalam istilah alternatif, sudut pandangnya menyarankan agar landasan organisasi harus mengutamakan etika kolektif di atas prinsip individualistis.

Oleh karena itu, sangat penting bagi para manajer dan karyawan untuk menganggap diri mereka sebagai mitra kolaboratif dan bukan sebagai musuh. Chester Barnard (1886–1961) menulis buku berjudul "The Functions of the Executive" pada tahun 1938. Karya ini menyajikan kerangka teoritis untuk memahami struktur organisasi dan bertujuan untuk menginspirasi penyelidikan lebih lanjut terhadap dinamika sistem koperasi. Barnard menjelaskan perbedaan antara motif pribadi dan organisasi dengan membahas konsep "efektif-efisien". Barnard berpendapat bahwa efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan sejauh mana motivasi individu dapat dipenuhi. Individu memandang organisasi formal sebagai struktur kohesif yang mendorong unsur-unsur universal seperti kerja sama, tujuan bersama, dan komunikasi. Sebaliknya, dalam organisasi informal, prioritas diberikan pada komunikasi, kohesi, dan pemeliharaan rasa harga diri individu. Kerangka teoritis Barnard juga mencakup konsep "penerimaan otoritas", yang menyatakan bahwa legitimasi otoritas atasan bergantung pada penerimaan sukarela dari bawahan.

4. Era modern

Abad ke-20 menjadi saksi munculnya konsep manajemen kualitas total (TQM), yang memainkan peran penting dalam membentuk periode kontemporer. Khususnya, TQM didirikan oleh pendidik manajemen

terkenal seperti W. Edwards Deming (1900-1993) dan Joseph Juran (lahir 1904). W. Edwards Deming, seorang sarjana dan ahli statistik Amerika, dikenal luas sebagai tokoh penting dalam pengembangan dan penerapan praktik pengendalian kualitas di Jepang. Deming berpendapat bahwa sebagian besar permasalahan kualitas bukan disebabkan oleh pekerja itu sendiri, melainkan karena kekurangan dalam sistem. Pembicara memberikan penekanan yang signifikan pada pentingnya peningkatan kualitas melalui pengenalan kerangka teoritis yang terdiri dari lima langkah berurutan. Penulis mengemukakan bahwa peningkatan kualitas akan menghasilkan beberapa manfaat: (1) berkurangnya biaya akibat berkurangnya biaya perbaikan, lebih sedikit kesalahan, minimal penundaan, dan peningkatan efisiensi dalam alokasi waktu dan sumber daya; (2) peningkatan produktivitas; (3) peningkatan pangsa pasar karena peningkatan kualitas dan penurunan harga; (4) meningkatkan profitabilitas perusahaan, memastikan keberlanjutannya di pasar; dan (5) peningkatan kesempatan kerja. Deming menetapkan kerangka kerja 14 poin yang komprehensif untuk merangkum ajarannya tentang peningkatan kualitas secara ringkas. Joseph Juran memberikan kontribusi penting kedua. Menurut pernyataannya, sebagian besar permasalahan, khususnya 80 persen, disebabkan oleh permasalahan yang berada dalam kendali manajemen. Berdasarkan kerangka teorinya, penulis merumuskan trilogi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas. Juran mengusulkan agar manajemen harus mengidentifikasi area spesifik dalam organisasi yang mengalami kekurangan dalam pengendalian kualitas.

Area tersebut kemudian dianalisis, diikuti dengan pengembangan dan implementasi solusi selanjutnya.

1.2 Pengertian Manajemen

Manajemen adalah proses mendasar yang memerlukan pengorganisasian dan koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Keberhasilan pencapaian tujuan individu atau kelompok memerlukan penerapan praktik manajemen yang efektif, yang melibatkan penggunaan sumber daya yang ada secara kolaboratif. Berdasarkan pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan mengatur unsur-unsur sedemikian rupa sehingga memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan. Fenomena ini sering terjadi dalam situasi praktis. Setiap individu wajib terlibat dalam penerapan ilmu manajemen secara tidak langsung dalam kesehariannya. Selain itu, konsep manajemen juga dapat dipahami kaitannya dengan asal usul etimologisnya. Manajemen mengacu pada praktik mengatur dan melaksanakan kegiatan, yang diambil dari sejarah asal Perancis. Manajemen dapat didefinisikan sebagai upaya yang disengaja untuk menyusun strategi, menyinkronkan, dan mengatur sumber daya yang tersedia dengan tujuan mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip manajemen, diharapkan pelaksanaan suatu tugas dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan dengan inefisiensi sumber daya yang minimal. Tujuan berhasil dicapai karena organisasinya yang efektif.

Ilmu manajemen merupakan suatu mata pelajaran yang dipersepsikan berbeda-beda oleh para ahli. Menurut Mary Parker Follet, manajemen dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan tugas secara terampil dengan memanfaatkan

perantara. Dalam skenario saat ini, manajemen dapat dikonseptualisasikan sebagai proses yang dilakukan oleh seorang manajer untuk membimbing dan mengawasi bawahan atau individu dalam menyelesaikan tugas dengan tujuan mencapai tujuan tertentu. George Robert Terry memberikan definisi manajemen yang komprehensif, mencirikannya sebagai proses kebiasaan yang mencakup berbagai aktivitas, termasuk perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Semua tindakan ini dilakukan dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan secara efisien semua sumber daya yang dapat diakses.

Menurut Ricky W. Gryphon, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dalam menyusun strategi, menyusun, menyelaraskan, dan mengawasi sumber daya untuk mencapai tujuan dengan cara yang berhasil dan efisien. Yang dimaksud dengan “efektif” dalam konteks ini adalah keberhasilan pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di sisi lain, “efisien” menunjukkan pelaksanaan tugas manajemen yang cermat dan terorganisir dalam jangka waktu yang ditentukan. Sebaliknya, Lawrence A. Appley memberikan definisi manajemen yang mencirikannya sebagai kemampuan untuk memotivasi individu agar bersedia terlibat dalam tindakan tertentu. Individu bukanlah satu-satunya pemilik kemampuan manajemen; sebaliknya, organisasi atau kelompok juga dapat menunjukkan bakat-bakat tersebut. Menurut Hilman, manajemen diartikan sebagai suatu fungsi yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan perantara dan melakukan pengawasan. Dengan mengadopsi pendekatan seperti ini, tujuan kolektif dapat tercapai secara efektif. Menurut beberapa sudut pandang profesional dalam bidang ilmu manajemen, konsep manajemen dapat diartikan secara luas sebagai koordinasi

dan pengawasan sistematis terhadap kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

1.3 Fungsi Manajemen

Peran mendasar ilmu manajemen adalah sebagai komponen penting dalam aktivitas manajemen, menyediakan kerangka kerja bagi mereka yang menduduki posisi manajerial untuk dijadikan acuan dan digunakan. Tanggung jawab utama manajer ini adalah memfasilitasi pencapaian tujuan melalui proses perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Dalam bidang ilmu manajemen terdapat lima fungsi yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Tanggung jawab yang tercakup dalam kerangka ini terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan, dan pengawasan. Tidak adanya peran-peran ini berpotensi menghambat pencapaian hasil atau tujuan yang diinginkan dalam kegiatan pengelolaan.

1. Langkah awal yang harus dilakukan seorang manajer adalah proses perencanaan. Melalui perencanaan strategis yang cermat, para manajer terlibat dalam evaluasi komprehensif terhadap seluruh inisiatif, yang mencakup upaya yang telah dilaksanakan dan upaya potensial. Tercapainya tujuan pengelolaan bergantung pada persiapan yang matang.
2. Selanjutnya dilanjutkan dengan menjalankan fungsi pengorganisasian. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan prosedur pemantauan yang dilakukan oleh manajemen.
3. Dalam peran penempatan, manajer bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi. Dengan cara ini, proses pencapaian tujuan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

4. Fungsi pemandu diterapkan untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas memerlukan kepatuhan terhadap arah atau rencana yang telah ditentukan untuk memastikan kelancaran operasi.
5. Terakhir, fungsi pemantauan adalah aspek terakhir yang perlu dipertimbangkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa operasi manajerial dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika terjadi hasil yang tidak menguntungkan, prosedur evaluasi dapat dimulai.

1.4 Unsur-Unsur Manajemen

Dalam melaksanakan tugas manajerial, suatu organisasi atau perusahaan memerlukan sumber daya yang biasa disebut dengan aspek manajemen. Masing-masing bagian tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kehadiran komponen manajerial ini dapat memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Aspek-aspek ini mencakup berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Manusia (Human)

Pentingnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan tidak dapat dilebih-lebihkan. Semua tindakan, yang mencakup seluruh spektrum mulai dari perencanaan awal hingga tahap implementasi selanjutnya, harus dilaksanakan hanya oleh agen manusia. Keberhasilan operasi suatu organisasi atau perusahaan bergantung pada pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia.

2. Uang (Money)

Peran uang dalam manajemen sangatlah penting karena memungkinkan kuantifikasi hasil berdasarkan sumber

daya keuangan yang mengalir di dalam organisasi. Uang juga berfungsi sebagai sumber daya yang berharga dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang metodis dan disengaja. Organisasi mengalokasikan sumber daya keuangan untuk pengeluaran operasional, termasuk remunerasi karyawan, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan lainnya.

3. Mesin (Machines)

Mesin berfungsi sebagai komponen manajerial yang berupa aset berwujud. Mesin mencakup peralatan logistik dan peralatan teknologi yang penting untuk berbagai aktivitas. Pengadaan dan pemanfaatan mesin harus diatur secara strategis untuk memastikan efisiensi, mencakup perolehan peralatan hemat biaya yang menawarkan kinerja produksi optimal.

4. Material (Bahan)

Mesin digunakan sebagai instrumen untuk menghasilkan hasil di bidang manufaktur. Mesin sering kali bermanifestasi sebagai seperangkat peralatan atau sistem teknologi, yang memfasilitasi produksi barang. Penggunaan manajemen mesin diperlukan untuk mengidentifikasi alat yang menunjukkan efisiensi tinggi dalam produksi, memiliki masa pakai yang lama, dan layak secara ekonomi. Penting untuk diketahui bahwa umur panjang mesin apa pun bergantung pada penerapan prosedur perawatan secara rutin.

5. Metode (Methods)

Dalam ranah manajemen, penerapan proses yang terstandar atau prosedur operasional standar dirasa perlu. Efektivitas dan efisiensi kerja dapat ditingkatkan dengan menggunakan metodologi yang tepat. Saat merancang metode kerja, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor seperti tujuan, fasilitas, waktu, sumber daya keuangan, dan

operasional perusahaan. Pemahaman komprehensif tentang pendekatan yang tepat dan efektif sangat penting bagi individu yang bertanggung jawab menerapkan praktik pengelolaan. Hal ini menyiratkan bahwa kemandirian suatu metode dapat ditingkatkan ketika keterlibatan manusia disertakan.

6. Pasar (Market)

Menargetkan pasar atau masyarakat tertentu secara luas merupakan aspek penting dalam mengelola hasil produk. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan barang pengelolaan mengalami kegagalan dan terhentinya produksi. Untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan atas suatu produk, sangat penting bagi manajemen untuk memiliki keterampilan pemasaran yang mahir. Tidak adanya permintaan dapat mengakibatkan terhentinya produksi. Bahkan aktivitas sebuah perusahaan pun bisa menjadi sepi.

Topik ilmu manajemen telah muncul sebagai bidang studi yang signifikan dalam masyarakat kontemporer. Pemanfaatan ilmu manajemen harus memberikan pengaruh terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, agar berhasil dan efisien menangani berbagai tanggung jawab, mengejar pendidikan manajemen bukanlah upaya yang merusak kehidupan seseorang.

1.5 Prinsip-Prinsip Manajemen

Menurut Henri Fayol ada 14 prinsip manajemen yang harus diketahui dalam mempelajari ilmu manajemen, yaitu:

1. Pembagian kerja

Gagasan pembagian kerja relevan bagi perusahaan dengan berbagai ukuran, baik perusahaan yang

memiliki jumlah karyawan yang banyak maupun perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit. Teori ini menganjurkan distribusi pekerjaan di antara individu-individu yang memiliki kemampuan yang diperlukan, daripada membebani beberapa individu tertentu secara berlebihan. Tugas tersebut tidak boleh dilemahkan dengan menugaskannya kepada banyak orang. Praktik ini menjamin pemanfaatan personel secara efisien dan menjaga konsentrasi serta produktivitas mereka. Seiring berjalannya waktu, penerapan alokasi tugas yang terfokus ini memudahkan spesialisasi tenaga kerja di bidang pekerjaannya masing-masing, sehingga menyebabkan penurunan terjadinya kesalahan secara signifikan. Dalam fasilitas manufaktur, peran pemecah masalah biasanya diberikan kepada individu yang memiliki pengalaman luas dalam mengoperasikan dan memelihara mesin dalam jangka waktu lama.

2. Otoritas

Alokasi wewenang dan akuntabilitas untuk mengeluarkan arahan harus dipercayakan secara eksklusif kepada beberapa individu tertentu, tanpa adanya pengenceran apa pun. Kesalahan yang sering terjadi pada perusahaan besar adalah kehadiran individu dalam jumlah berlebihan dalam struktur manajemen sehingga menimbulkan konflik. Ketika sekelompok individu tertentu memiliki kemampuan untuk menggunakan hak pilihnya, wewenang ini kemudian disebarluaskan ke seluruh hierarki, dan proses pemungutan suara pun dijalankan. Tanggung jawab menyertai kepemilikan otoritas. Pertimbangkan skenario hipotetis di mana Anda mengambil peran sebagai eksekutif pemasaran dalam suatu organisasi. Dalam skenario ini, Anda menerima panggilan telepon

yang berkaitan dengan pemasaran produk tertentu. Penting untuk dicatat bahwa, jika terjadi kegagalan produk, Anda akan bertanggung jawab atas kekurangan yang terkait. Uang tidak mungkin diabaikan. Ketika seseorang memikul tanggung jawab, mereka secara bersamaan membuat pilihan yang bijaksana. Oleh karena itu, konsep wewenang dan tanggung jawab secara intrinsik terkait dan merupakan komponen penting dalam kerangka 14 prinsip manajemen Henri Fayol.

3. Disiplin

Diakui secara luas bahwa tanggung jawab untuk menjaga disiplin dalam suatu organisasi terletak pada manajemen. Selain itu, disiplin ini meresap ke seluruh hierarki karyawan. Salah satu ilustrasi penting dapat ditemukan di biro iklan, ketika pengembangan pertemuan dan percakapan informal dipromosikan secara aktif sebagai sarana untuk membina hubungan pelanggan yang lebih baik. Namun demikian, perlu dicatat bahwa perusahaan periklanan ini terkenal menjunjung tinggi rasa ketertiban dan profesionalisme dalam cara profesional periklanannya berinteraksi dengan klien dan melaksanakan tanggung jawab mereka. Misi dan nilai-nilai organisasi mencakup penyertaan disiplin sebagai komponen integral.

4. Kesatuan komando

Pada poin sebelumnya, konsep otoritas telah dibahas, dengan menyatakan bahwa alokasi otoritas harus dibatasi pada individu tertentu. Demikian pula halnya dengan pengalihan wewenang yang terjadi secara hierarkis, yaitu bergantung pada kehadiran sejumlah individu tertentu yang mempunyai hubungan dengan orang yang memegang jabatan otoritatif. Jika semua anggota partai politik melapor langsung kepada

perdana menteri, kemungkinan besar perdana menteri akan mengalami peningkatan tingkat stres yang signifikan, yang mungkin mengakibatkan perlunya rawat inap secara cepat. Untuk menegakkan sistem yang terstruktur, diterapkan struktur hierarki. Direkomendasikan bahwa seorang individu harus bertanggung jawab kepada seorang pemimpin dibandingkan bertanggung jawab kepada banyak pemimpin, yang biasanya berkisar antara tiga sampai empat orang. Oleh karena itu, sebagian besar organisasi biasanya mempertahankan hierarki tipikal yang terdiri dari manajer nasional, manajer regional, manajer kelompok, dan pemimpin tim. Praktik ini menjamin bahwa para manajer dan eksekutif mempertahankan pemahaman yang jelas tentang struktur pelaporan mereka, serta tugas yang diberikan kepada mereka dan tingkat kinerja yang diharapkan dari mereka.

5. Kesatuan arah

Ketika prinsip kesatuan komando telah ditetapkan dan struktur hierarki yang komprehensif sudah ada, di mana individu menyadari garis pelaporan mereka, dan siap untuk melaksanakan arahan pemimpin, maka sudah saatnya untuk melanjutkan penerapan kesatuan komando. arah. Sangat penting bagi perusahaan, mulai dari kepemimpinan eselon tertinggi seperti CEO, hingga tingkat eksekutif, untuk menunjukkan lintasan yang kohesif dan terpadu. Jika arah seseorang menuju pertumbuhan, maka sangat penting bagi individu yang memegang posisi eksekutif hingga CEO perusahaan untuk menunjukkan kinerja yang mendorong pertumbuhan dalam organisasi. Pelatihan dan manajemen para eksekutif ini harus dilakukan dengan cara yang selaras dengan praktik manajerial yang sudah ada.

6. Kepentingan bawahan

Untuk mengelola personel secara efektif, pertama-tama penting untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang kepentingan individu mereka. Pada akhirnya, sangat penting untuk mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Seringkali, seseorang diberhentikan dari pekerjaannya saat ia juga melakukan pekerjaan sampingan atau mencari pekerjaan mandiri. Hal ini karena organisasi bertujuan untuk menjamin bahwa karyawannya menunjukkan komitmen dan dedikasi yang teguh terhadap organisasi. Penekanan utama organisasi terletak pada individu yang mendedikasikan upaya dan sumber dayanya yang terbaik untuk kemajuan perusahaan. Kepentingan perusahaan harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi.

7. Remunerasi

Untuk menumbuhkan kedisiplinan di kalangan pegawai, maka perlu adanya rasa persatuan dalam hal pengarahan dan komando. Selain itu, sangat penting untuk menerapkan sistem penghargaan yang memberikan insentif kepada karyawan untuk tetap fokus pada tugas yang diberikan kepada mereka daripada mengalihkan perhatian mereka ke upaya kompetitif. Menurut 14 prinsip manajemen Henri Fayol, sangat penting untuk memastikan kompensasi yang adil bagi karyawan untuk mempertahankan motivasi mereka pada tingkat yang tinggi. Kompensasi tersebut dapat berupa imbalan moneter atau non-moneter. Kompensasi moneter mencakup berbagai bentuk imbalan finansial, seperti insentif, bonus, atau bentuk kompensasi uang lainnya. Kompensasi non-moneter mencakup beberapa bentuk pengakuan dan penghargaan.

8. Sentralisasi

Sentralisasi mengacu pada tingkat otoritas dan kekuasaan pengambilan keputusan yang dimiliki individu dalam struktur organisasi. Sentralisasi mengacu pada struktur organisasi di mana sekelompok individu tertentu, seperti mereka yang memiliki posisi penting dalam sebuah perusahaan besar, memiliki otoritas dan kekuasaan dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, ketika sebagian besar individu di dalam organisasi mempunyai otoritas pengambilan keputusan, misalnya dalam konteks perusahaan kecil, fenomena ini disebut sebagai desentralisasi. Organisasi diharuskan mencapai keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi. Banyak perusahaan terkemuka menggunakan unit bisnis strategis sebagai sarana desentralisasi. Unit bisnis strategis (SBU) ini memiliki otoritas pengambilan keputusan yang otonom. Demikian pula, sebagian besar usaha kecil suka mendistribusikan wewenang secara terdesentralisasi untuk mempercepat penyelesaian tugas. Keputusan untuk menerapkan sentralisasi sebagai pendekatan manajemen bergantung pada perusahaan dan industri tertentu yang sedang dipertimbangkan.

9. Rantai Skalar

Prinsip rantai skalar menyatakan bahwa organisasi harus menetapkan garis kekuasaan yang jelas dalam strukturnya. Dalam keadaan darurat atau tragedi, sangat penting untuk memiliki pengetahuan mengenai saluran bantuan yang tepat, jika atasan langsung terbukti tidak mampu menjawab pertanyaan terkait. Perusahaan terkemuka seperti Samsung, antara lain, telah membangun rantai skalar di lokasi terpusat. Protokol layanan pelanggan mengharuskan jika keluhan pelanggan tetap tidak terselesaikan selama tiga hari,

keluhan tersebut akan diteruskan ke manajer regional. Jika masalah ini terus berlanjut lebih dari lima hari tanpa penyelesaian, maka masalah ini akan dieskalasi lebih lanjut ke kepala daerah provinsi. Terakhir, jika pengaduan masih belum terselesaikan dalam jangka waktu tujuh hari, maka pengaduan tersebut akan diteruskan ke kepala pusat.

10. Pesan

Struktur hierarki organisasi ini tidak berarti bahwa seorang individu yang menduduki jabatan tertinggi menjalankan otoritas terhadap individu-individu yang berada di bawahnya. Seri ini mengeksplorasi dikotomi antara keteraturan dan kekacauan. Intinya, tidak adanya kerangka operasional yang terstruktur dengan baik dalam suatu organisasi dapat menyebabkan kekacauan dan kebingungan. Untuk memfasilitasi alur kerja yang sistematis, staf harus memiliki peralatan yang sesuai dan mematuhi protokol yang ditetapkan, sehingga memastikan pemeliharaan ketertiban yang konsisten. Akibatnya, sebagian besar perusahaan besar memiliki metodologi standar untuk menentukan kehadiran karyawan. Istirahat makan siang dialokasikan kepada pekerja berdasarkan stasiun kerja masing-masing pada periode tertentu yang telah ditentukan. Karyawan pemeliharaan bertanggung jawab untuk mengatasi masalah apa pun yang timbul pada peralatan. Secara umum, semua komponen berfungsi secara efisien dan lancar, menunjukkan tingkat organisasi dan koherensi yang tinggi. Gagasan menjaga ketertiban memiliki arti penting dalam kerangka 14 prinsip manajemen Henri Fayol.

11. Ekuitas

Prinsip perlakuan yang sama bagi semua individu, tanpa perlakuan istimewa apa pun, harus ditegakkan di

seluruh organisasi. Seringkali, keluhan umum yang disuarakan oleh karyawan berkaitan dengan persepsi pilih kasih yang ditunjukkan dalam pemilihan individu untuk promosi atau peningkatan kompensasi. Meskipun demikian, organisasi yang adil dan merata ditandai dengan komitmennya untuk menjunjung kesetaraan antar individu. Oleh karena itu, keberadaan budaya organisasi yang tepat sangatlah penting. Pemeliharaan ekuitas bergantung pada praktik etika organisasi.

12. Stabilitas tenurial

Salah satu elemen penting yang ditekankan dalam 14 prinsip manajemen Henri Fayol adalah konsep stabilitas lapangan kerja, yang mencakup gagasan meminimalkan penurunan angkatan kerja. Menurut Henri Fayol, dapat dikatakan bahwa potensi percepatan pertumbuhan suatu organisasi akan meningkat ketika tenaga kerjanya menunjukkan stabilitas. Jika terjadi pengurangan yang signifikan dalam suatu organisasi, diperkirakan akan banyak waktu yang dihabiskan untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan. Hal ini, pada gilirannya, akan menyebabkan peningkatan pengeluaran dan berkurangnya penekanan pada pemeliharaan stabilitas kepemilikan lahan. Saat meneliti sebagian besar perusahaan besar, terlihat jelas bahwa mereka sangat mementingkan upaya mengatasi pengurangan dan pergantian staf. Berbagai protokol diterapkan untuk memitigasi pengurangan karyawan dalam organisasi, dan jika ada karyawan yang mengundurkan diri, penting bagi manajemen untuk memastikan alasan yang mendasari pengunduran diri mereka. Demikian pula, strategi alternatif, seperti rotasi kerja untuk mengurangi monoton, insentif untuk mendorong dorongan, dan sejumlah tindakan lainnya, dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan kerja.

13. Inisiatif

Gagasan tentang perusahaan yang melakukan inovasi dan memperkenalkan produk baru ke pasar membangkitkan rasa optimisme dan antusiasme. Namun, sering kali ada pertanyaan mengapa perusahaan tidak melakukan inovasi secara rutin. Setelah diteliti, menjadi jelas bahwa organisasi-organisasi yang paling banyak menjadi pionir adalah organisasi-organisasi yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi lahirnya ide-ide baru oleh individu-individu dari berbagai kelompok umur. Selain itu, mereka menunjukkan minat dan keterlibatan aktif untuk menumbuhkan motivasi di antara para ahli ini. Google, Apple, dan Facebook adalah contoh penting perusahaan yang berhasil mengadopsi ide ini dalam kerangka 14 prinsip manajemen. Di Google, pengembang dan teknisi diberikan waktu khusus untuk mengeksplorasi pendekatan baru yang berpotensi dikembangkan menjadi produk eksklusif bagi perusahaan. Pernyataan serupa di atas juga dapat diterapkan pada Facebook dan Apple. Tingginya tingkat inovasi organisasi-organisasi ini dapat dikaitkan dengan dorongan inisiatif karyawan.

14. Semangat korps

Esprit de corp Identitas kolektif adalah sentimen kebanggaan dan kesetiaan yang diterima secara umum yang dimiliki bersama di antara individu-individu yang tergabung dalam komunitas tertentu. Untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan 14 prinsip manajemen, penting untuk berupaya mencapai tujuan tersebut di atas. Konsep *esprit de corps* mewakili tingkat sinergi tertinggi antara manajemen dan karyawan dalam suatu organisasi, sehingga menghasilkan rasa bangga kolektif terhadap aktivitas organisasi dan menumbuhkan

loyalitas yang kuat baik di antara karyawan maupun konsumen. Terdapat sejumlah perusahaan yang memiliki kapasitas untuk mengawasi tugas tersebut secara efektif, termasuk Intel, Apple, Amazon, dan beberapa perusahaan lainnya. Kehadiran *esprit de corps* dalam suatu organisasi memberikan keunggulan kompetitif yang nyata bagi organisasi tersebut, karena hal ini menandakan bahwa karyawan menunjukkan tingkat antusiasme, motivasi, dan kemauan yang tinggi untuk melakukan yang terbaik dalam melayani perusahaan atau manajemennya. Secara umum, ke-14 konsep manajemen ini memiliki relevansi yang bertahan lama, dan terlepas dari kemajuan teknologi, konsep tersebut akan tetap penting bagi organisasi dari semua ukuran, termasuk organisasi yang baru lahir dan organisasi yang sedang mengalami pertumbuhan. Terdapat metode alternatif yang lebih mudah untuk memantau aspek-aspek tertentu yang diuraikan dalam 14 prinsip pengelolaan. Namun, tujuan utamanya adalah untuk membentuk organisasi yang dikelola secara efisien yang beroperasi secara produktif dan mencapai hasil optimal yang selaras dengan tujuan organisasinya.

1.6 Bidang-Bidang Manajemen

Dalam kerangka perusahaan atau organisasi, tugas-tugas operasional disusun dan ditugaskan berdasarkan sistem pembagian kerja yang disusun dalam domain manajemen yang berbeda. Masing-masing sektor ini diawasi oleh seorang manajer yang akan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan operasi manajemen, meliputi perencanaan, pemantauan, dan penilaian akhir. Kemanjuran operasi manajerial ini pada akhirnya akan menentukan

tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dialami perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Semakin tinggi kualitas manajemen maka semakin besar pula tingkat optimalisasi dalam mencapai tujuan. Sebaliknya, pengelolaan yang tidak efektif dapat berdampak signifikan pada ketidakmampuan organisasi mencapai tujuan atau sasarannya. Lima bidang manajemen mencakup aspek-aspek berikut:

1. Manajemen Produksi

Pentingnya manajemen produksi dalam konteks persaingan perusahaan tidak dapat dilebih-lebihkan. Bidang ini memainkan peran penting dalam menentukan kualitas dan kinerja keseluruhan produk atau layanan tertentu. Semakin efektif suatu perusahaan menangani aktivitas produksinya, semakin tinggi potensi keberhasilan dalam daya saing pasar. Sebaliknya, jika operasi produksi berada di bawah standar, kualitas produk tidak hanya akan terganggu, namun juga akan terjadi peningkatan limbah sebagai akibat dari penumpukan bahan mentah atau inventaris. Pada akhirnya, hal ini dapat menyebabkan defisit keuangan bagi organisasi. Singkatnya, tanggung jawab manajemen produksi adalah memastikan penyediaan produk atau layanan siap pasar secara tepat waktu. Efisien menurut kriteria yang ditentukan, proses produksi meliputi pengadaan bahan baku, proses manufaktur selanjutnya, dan finalisasi produk.

Untuk memastikan kelancaran operasi dan keberhasilan pelaksanaan proses, manajemen sistem produksi harus mempertimbangkan faktor-faktor tertentu selama tahap desain. Faktor-faktor ini meliputi;

- a. Rancangan produk atau jasa.
Langkah awal bagian produksi adalah memperoleh pengetahuan tentang representasi visual dari desain produk. Selanjutnya, berbagai aspek yang berkaitan dengan proses produksi dapat dilihat. Misalnya saja dari segi teknologi atau peralatan. Pertanyaan apakah teknologi saat ini mampu mengakomodasi proses manufaktur memerlukan pertimbangan potensi penambahan, modifikasi, atau bahkan penggantian.
- b. Volume produksi.
Tim produksi juga harus memperhitungkan kuantitas produk yang akan diproduksi. Penting untuk mempertimbangkan kapasitas fasilitas produksi dalam kaitannya dengan kemampuannya untuk memenuhi jumlah keluaran produk yang diinginkan. Selain itu, perlu dilakukan analisis untuk memastikan tidak terjadi surplus kuantitas produksi. Sederhananya, tujuannya adalah untuk mencegah penumpukan inventaris yang menyebabkan kerugian finansial bagi organisasi.
- c. Proses produksi.
Selama fase prosedural ini, tim produksi diharuskan mengevaluasi secara cermat proses atau metodologi yang paling optimal, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam pembuatan produk.
- d. Lokasi dan tata letak.
Hal ini berkaitan dengan lokasi dimana proses produksi akan dilakukan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan penataan atau konfigurasi lokasi atau tata letak yang optimal. Misalnya, penyelidikan berkaitan dengan lokasi spesifik yang terkait dengan pengadaan bahan mentah,

pelaksanaan proses produksi, dan penyimpanan barang jadi. Penting untuk diingat bahwa perjanjian ini harus sejalan dengan peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

e. Rancangan pekerjaan.

Kekhawatiran di atas berkaitan dengan penetapan standar, alokasi tugas, dan individu yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sistem operasi. Selain faktor-faktor tersebut di atas, manajemen produksi juga harus mengawasi dan mengutamakan pengendalian sistem operasional, dengan penekanan khusus pada pengendalian kualitas dan manajemen persediaan.

f. Manajemen mutu.

Intinya, sangat penting bagi organisasi untuk menjaga kelestarian kualitas produk yang terjamin. Hal ini dicapai melalui pertimbangan cermat terhadap faktor-faktor penting, termasuk penilaian kualitas bahan baku, penggunaan teknologi yang menjamin kualitas, penetapan tanggal kadaluwarsa atau masa berlaku produk, dan penggunaan kemasan yang mematuhi standar yang ditetapkan.

g. Manajemen persediaan.

Dalam skenario khusus ini, tim diharuskan mempertimbangkan jumlah inventaris yang optimal untuk memfasilitasi kelancaran dan efisiensi fungsi operasional perusahaan. Sangat penting untuk menerapkan strategi manajemen inventaris yang efektif di dalam organisasi untuk meminimalkan terjadinya kehabisan stok sekaligus menghindari akumulasi inventaris yang berlebihan. Oleh karena itu, sangat penting bagi tim untuk rajin melakukan penghitungan dan melakukan tindakan pengendalian inventaris yang ketat.

2. Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran dapat didefinisikan sebagai pengawasan strategis dan operasional terhadap aktivitas yang terlibat dalam keberhasilan pengiriman produk atau jasa dari produsen ke konsumen. Langkah awal melibatkan identifikasi seluruh kebutuhan penting dalam masyarakat, diikuti dengan pengembangan strategi komprehensif yang bertujuan untuk secara efektif menangani dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Manajemen pemasaran mencakup berbagai aspek proses pemasaran, termasuk pemasaran produk, riset pasar, strategi dan media promosi, sistem distribusi, dan kepuasan pelanggan.

Dalam skenario khusus ini, terdapat empat komponen penting yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan keberhasilan dan keselarasan proses pemasaran produk. Keempat aspek tersebut mempunyai ciri-ciri yang saling berhubungan sehingga perlu dimasukkannya kesemua aspek tersebut di antara pertimbangan-pertimbangan lainnya:

a. Produk

Penting untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan selaras dengan permintaan pasar yang ada. Oleh karena itu, dalam skenario seperti ini, melakukan riset pasar sangatlah penting untuk memastikan kebutuhan produk dan potensinya untuk keberhasilan penetrasi pasar. Dalam konteks ini, sangat penting bagi organisasi untuk memiliki kemampuan membedakan atribut dan fitur spesifik yang diinginkan calon konsumen. Penting untuk diingat bahwa, selain fitur praktis, faktor seperti kualitas dan kemudahan penggunaan sering kali dipertimbangkan.

b. Harga

Pertimbangan harga juga menjadi faktor yang harus diabaikan. Dalam menetapkan strategi penetapan harga, korporasi wajib memperhitungkan daya beli segmen masyarakat tertentu yang dibidiknya untuk tujuan pemasaran.

c. Promosi

Upaya promosi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pemasaran suatu produk. Berbagai format media, yang mencakup platform cetak tradisional dan digital, dapat digunakan untuk tujuan memperkenalkan dan membangun identitas produk atau layanan. Terakhir, penting bagi organisasi untuk mempertimbangkan aspek distribusi. Dasar pemikirannya terletak pada kenyataan bahwa proses distribusi memfasilitasi aksesibilitas produk kepada konsumen.

3. Manajemen Keuangan

Tanggung jawab manajemen keuangan mencakup pengawasan dan pengendalian aliran masuk dan keluar dana dalam suatu organisasi. Hal ini berkaitan dengan prosedur yang terlibat dalam perolehan sumber daya keuangan dan alokasinya untuk mencapai tujuan atau pencapaian organisasi. Secara garis besar, fungsi organisasi berkaitan dengan administrasi sumber pendanaan, alokasi uang, dan pengawasan operasi keuangan tersebut. Pengelolaan sumber uang berkaitan dengan asal usul dana, yang dapat diperoleh baik secara internal maupun eksternal organisasi. Alokasi dana diatur oleh manajemen untuk menentukan pemanfaatannya, termasuk untuk investasi jangka panjang, modal jangka pendek, atau keperluan mendesak. Kewaspadaan dalam memantau aliran dana

ini sangat penting untuk mencegah kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi organisasi.

4. Manajemen Personalia (Sumber Daya Manusia)

Manajemen personalia berkaitan dengan organisasi sistematis dan administrasi sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Dimulai pada tahap awal perencanaan strategis, prosesnya meliputi rekrutmen, koordinasi, pembinaan, evaluasi, dan pengawasan pengadaan tenaga kerja. Sangat penting untuk mengevaluasi karyawan dengan cara yang adil dan tidak memihak, dengan mempertimbangkan prestasi dan keterampilan mereka. Untuk mengoptimalkan alokasi tenaga kerja dan meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan mungkin secara strategis menugaskan orang-orang ke posisi yang paling sesuai.

Selain itu, sangat penting bagi organisasi untuk memberikan pengakuan atas prestasi karyawan, yang dapat mencakup beberapa bentuk seperti penghargaan finansial, kemajuan karir, atau bentuk pengakuan lainnya. Hal ini mungkin dapat berfungsi sebagai insentif tidak langsung bagi individu untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Manajemen Administrasi

Disiplin administrasi berkaitan dengan pengelolaan kegiatan perkantoran yang efektif, khususnya dalam bidang pelayanan administrasi. Selain itu, hal ini mencakup aksesibilitas dan efisiensi penggunaan peralatan kantor. Pengarsipan informasi yang efisien merupakan persyaratan penting bagi sistem manajemen administrasi, karena memastikan penyajian data yang komprehensif, terorganisir dengan baik, dan mudah diakses.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, I Komang. 2017. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arep, Ishak & Hendri Tanjung. 2019. *Manajemen Motivasi*. Jakarta. PT grasindo.
- Dessler, Gary. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jilid 1 Edisi 10, Alih Bahasa : Paramita Rahay, (2016),Indeks,Jakarta.
- Dessler, Gary. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi Jakarta Bumi Aksara. Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Handoko dalam jurnal Desmawati. 2017. Manajemen personalia dan sumber daya manusia. Edisi ke-2. BPFE.Yogyakarta.
- Hasibuan & Melayu S.P. 2019. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Ismail. Tubagus. 2016. Pengaruh Kompensasi Dan Kompetensi Dengan Motivasi Sebagai Intervening Dalam Meningkatkan Kinerja. Jurnal Manajemen/Volume XX, No. 03, Oktober 2016: 353-369. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Kasmir. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*(Teori dan Praktek). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mangkunegara. 2019. *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Malayu, S,P Hasibuan. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Edisi Revisi). Jakarta : PT. Bumi Aksara.

BAB 2

KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH

Oleh Arief Yanto Rukmana

2.1 Pendahuluan

Landasan bidang ekonomi Islam adalah konsep dasar yang komprehensif, menjadi landasan kerangka ekonomi memberikan solusi dan alternatifnya (Wahana and Rukmana, 2023). Konsep-konsep ini berakar pada prinsip-prinsip inti pandangan dunia Islam, yaitu keterkaitan iman dan keuangan (Feliyani, 2021).

Ekonomi Islam berpedoman pada keyakinan akan keesaan Tuhan (Tauhid) (Huda, 2013). Prinsip ini mengakui bahwa semua sumber daya ekonomi pada akhirnya adalah milik Tuhan, dan setiap individu dianggap sebagai pengelola yang dipercaya untuk mengelola sumber daya tersebut (Feliyani, 2021). Perspektif ini menanamkan rasa tanggung jawab terhadap perilaku ekonomi yang etis dan bertanggung jawab (Prasetyo, 2018).

Salah satu konsep sentral dalam ekonomi Islam adalah pembedaan antara Halal (dibolehkan) dan Haram (dilarang) (Bakar, 2021). Prinsip ini menggambarkan apa yang secara etis dapat diterima dalam kegiatan ekonomi (Istiqomah, 2019). Transaksi dan praktik bisnis yang sesuai dengan hukum Islam, atau Syariah, dianggap Halal, sedangkan transaksi dan praktik bisnis yang melanggar prinsip-prinsipnya, seperti melakukan riba atau perdagangan tidak etis, dianggap Haram (Soemitra, 2020).

Zakat, sumbangan amal wajib, adalah konsep penting dalam ekonomi Islam. Hal ini mewajibkan individu untuk menyumbangkan sebagian kekayaannya kepada yang membutuhkan, yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Praktik ini menumbuhkan keadilan sosial dan solidaritas dalam sistem ekonomi Islam (Furqon, 2015).

Larangan Riba , atau bunga, adalah konsep dasar lainnya (Bakar, 2021). Ekonomi Islam dengan tegas mengutuk perolehan uang melalui pemungutan bunga, karena menganggapnya eksploitatif dan tidak etis. Larangan ini mendorong pembagian risiko dan transaksi keuangan yang etis (Hafidhuddin, 2002).

Gharar , atau ketidakpastian yang berlebihan, adalah sebuah konsep yang tidak menganjurkan kontrak dengan ambiguitas atau risiko yang berlebihan. Prinsip ini mengedepankan transparansi dan keadilan dalam transaksi ekonomi, memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki pemahaman yang jelas tentang syarat dan ketentuan (Sahroni *et al.*, 2018).

Lebih jauh lagi, ekonomi Islam menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab individu dan sosial. Tanggung jawab individu menekankan perilaku etis dalam kegiatan ekonomi dan mendorong individu untuk terlibat dalam usaha ekonomi yang bermoral (Hakim, 2012). Tanggung jawab sosial , di sisi lain, menekankan peran negara dalam menjamin keadilan, mengatur pasar, dan mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat (Ridlo, 2014).

Konsep dasar ekonomi Islam mencerminkan hubungannya yang mendalam dengan prinsip, etika, dan nilai-nilai Islam. Konsep-konsep ini memandu perilaku ekonomi, mendorong perilaku etis, distribusi kekayaan yang adil, dan keadilan sosial. Ekonomi Islam menawarkan

kerangka ekonomi yang khas, di mana iman dan keuangan bersinggungan, yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya sehat secara finansial tetapi juga jujur secara etika dan moral (Ridwan and Saebani, 2013).

2.2 Landasan Ekonomi Islam



Gambar 2.1. Ekonomi Islam
(Sumber : <https://sarjanaekonomi.co.id/>)

Fondasi ekonomi Islam berakar kuat pada pandangan dunia Islam, yang berpusat pada prinsip Tauhid (monoteisme), Syariah (hukum Islam), dan penekanan kuat pada nilai-nilai etika dan moral. Ekonomi Islam memberikan kerangka unik yang menggabungkan aktivitas ekonomi dengan dimensi spiritual dan sosial. Pada intinya, ekonomi Islam berupaya untuk membangun sistem ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan perilaku etis (Feliyani, 2021).

Salah satu prinsip dasar ekonomi Islam adalah konsep Halal dan Haram, yang membedakan apa yang boleh

(Halal) dan apa yang dilarang (Haram) dalam transaksi dan aktivitas ekonomi. Kerangka etika ini memandu perilaku ekonomi dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menumbuhkan kepercayaan dan transparansi dalam transaksi (Al-Qaradhwawi, 2022).

Zakat, pemberian wajib sebagian kekayaan seseorang kepada orang-orang yang kurang mampu, merupakan landasan penting lainnya dalam perekonomian Islam. Praktik ini berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, meningkatkan solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Zakat tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan keharmonisan sosial.

Larangan Riba (riba atau bunga) merupakan landasan ekonomi Islam. Hal ini mencerminkan keyakinan Islam bahwa kekayaan tidak boleh dihasilkan melalui eksploitasi kerentanan finansial orang lain. Larangan ini mendorong pembagian risiko dan investasi dalam usaha yang produktif dan beretika, dibandingkan praktik pemberian pinjaman yang eksploitatif (Marthon, 2004).

Konsep Gharar (ketidakpastian atau ambiguitas yang berlebihan) merupakan inti dari transaksi ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak menganjurkan kontrak dengan ketidakpastian yang berlebihan, mendorong transparansi dan keadilan dalam perdagangan dan perdagangan (Hasan, 2002). Prinsip ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dengan jelas dan jujur, sehingga mengurangi potensi perselisihan dan eksploitasi (Tantowi, 2022).

Ekonomi Islam juga sangat menekankan tanggung jawab individu dan sosial. Setiap individu didorong untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang sehat secara moral dan etika, sementara negara bertugas memastikan keadilan

dalam urusan ekonomi, mengatur pasar, dan mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanggung jawab ganda ini menumbuhkan rasa keadilan sosial dan perilaku etis dalam urusan ekonomi (Siregar, Yuslem and Nawawi, 2023).

Landasan ekonomi Islam berakar kuat pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, termasuk Tauhid, Syariah, perilaku etis, dan prinsip Halal, Haram, Zakat, Riba, dan Gharar (Istiqomah, 2019). Konsep-konsep dasar ini membentuk kerangka ekonomi Islam, mempromosikan kegiatan ekonomi yang selaras dengan etika dan prinsip-prinsip Islam sambil mengatasi masalah distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan keadilan ekonomi dalam masyarakat (Bakar, 2021). Ekonomi Islam mewakili pendekatan unik terhadap manajemen ekonomi yang berupaya menyelaraskan kegiatan ekonomi dengan dimensi spiritual dan sosial, menumbuhkan sistem ekonomi yang adil dan berlandaskan moral (Al-Qaradhawi, 2022).

2.3 Agen Ekonomi dalam Ekonomi Islam

Dalam konteks ekonomi Islam, konsep agen ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk lanskap perekonomian (Iqbal, 2012). Ekonomi Islam sangat menekankan tanggung jawab individu dan kolektif dalam kegiatan ekonomi (Subarman, 2015). Individu dipandang sebagai agen moral yang mempunyai tanggung jawab untuk terlibat dalam upaya ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sehat secara etika dan moral (Fahlevi *et al.*, 2023). Perspektif ini menggarisbawahi gagasan bahwa pelaku ekonomi harus menyelaraskan tindakan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam (Mudhiyah, 2016), memastikan bahwa kegiatan ekonomi berkontribusi terhadap kebaikan serta

kemaslahatan untuk masyarakat (Misra, Hakim and Pramana, 2020).

Pelaku ekonomi dalam ekonomi Islam diharapkan menjunjung tinggi rasa tanggung jawab sosial (Ghofur, 2020). Artinya, individu dan dunia usaha harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari keputusan ekonomi terhadap masyarakat (Soemitra, 2020). Didorong untuk terlibat dalam praktik-praktik yang memajukan keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dimensi sosial dari agen ekonomi ini berakar kuat pada konsep Syariah, yang tidak hanya mencakup perilaku individu tetapi juga kesejahteraan kolektif masyarakat pada ruang lingkup yang besar (Prasetyo, 2018).

Peran negara sebagai agen ekonomi dalam perekonomian Islam juga penting. Negara dipandang sebagai penjaga keadilan dalam urusan ekonomi (Prasetyo, 2018). Badan ini bertanggung jawab untuk mengatur pasar, memastikan persaingan yang sehat, dan mencegah praktik yang tidak etis. Selain itu, negara memainkan peran penting dalam alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi yang kurang beruntung (Rijal *et al.*, 2023). Alokasi ini berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan redistribusi kekayaan yang merupakan inti perekonomian Islam (Furqon, 2015).

Pelaku ekonomi dalam perekonomian Islam bukan sekedar entitas yang berorientasi pada keuntungan namun diharapkan bertindak dengan rasa tanggung jawab moral dan sosial yang kuat (Djuniardi *et al.*, 2023). Pendekatan holistik terhadap lembaga ekonomi ini berupaya menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya kuat secara finansial namun juga adil secara etika dan sosial (Ridlo, 2014). Hal ini mencerminkan pandangan dunia Islam yang lebih luas, yang sangat menekankan etika individu dan

kolektif (Kasdi, 2017), dan keyakinan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai ini demi kemajuan masyarakat (Hafidhuddin, 2002).

2.4 Konsep Ekonomi dalam Ekonomi Islam

Konsep ekonomi dalam ekonomi Islam merupakan bagian integral dari kerangka sistem ekonomi yang unik ini, memberikan panduan bagi kegiatan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Razali *et al.*, 2023). Inti dari konsep-konsep ini adalah gagasan kepemilikan, yang membedakan antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Ekonomi Islam mengakui hak atas kepemilikan pribadi sambil menekankan bahwa kepemilikan pada akhirnya berasal dari Allah, dan individu dianggap sebagai pengurus (wali) atas harta benda. Konsep ini mendorong penggunaan properti dan aset seseorang secara bertanggung jawab dan etis (Muhtadi *et al.*, 2023).

Distribusi kekayaan adalah konsep ekonomi utama dalam ekonomi Islam. Sistem ini sangat menekankan distribusi kekayaan yang adil dan pengurangan kesenjangan kekayaan dalam masyarakat. Praktek Zakat, yaitu kewajiban memberikan sebagian kekayaan seseorang kepada orang yang kurang mampu, merupakan landasan dari konsep ini. Zakat berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan, memastikan bahwa orang kaya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan memperkuat solidaritas sosial (Rukmana, 2023).

Ekonomi Islam juga membahas aktivitas ekonomi melalui kaca mata pertimbangan etis (Waluyo *et al.*, 2023). Perdagangan dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang sah dan didorong, asalkan mematuhi prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, transparansi, dan transaksi yang adil.

Perburuan dan ketenagakerjaan juga dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang penting, dengan ketentuan bahwa pekerja diperlakukan secara adil dan dibayar dengan upah yang adil. Kewirausahaan dihargai dan dipromosikan, dengan penekanan pada praktik bisnis yang etis dan tanggung jawab sosial (Mufraini, 2006).

Konsep ekonomi ekonomi Islam mencakup gagasan pembagian risiko dan usaha ekonomi kooperatif. Pengaturan pembagian keuntungan dan kerugian, yang dikenal sebagai Mudarabah dan Musharakah, dianjurkan, dimana kedua belah pihak berbagi risiko dan manfaat dari suatu usaha bisnis. Konsep-konsep ini menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dan mendorong keadilan dalam hubungan ekonomi (Sari *et al.*, 2023).

Ekonomi Islam juga membatasi praktik ekonomi yang dianggap tidak etis atau eksploitatif (Feliyani, 2021). Larangan Riba (riba atau bunga) menghalangi praktik peminjaman yang menghasilkan kekayaan melalui eksploitasi, dan konsep Gharar (ketidakpastian atau ambiguitas yang berlebihan) menghalangi kontrak dengan ketidakpastian yang berlebihan (Mufraini, 2006). Pembatasan ini mendorong transaksi ekonomi yang beretika dan transparan serta mencegah praktik-praktik yang dapat mengarah pada eksploitasi ekonomi (Hakim *et al.*, 2023).

Konsep ekonomi dalam ekonomi Islam berkisar pada prinsip kepemilikan, distribusi kekayaan, aktivitas ekonomi etis, pembagian risiko, dan pembatasan praktik eksploitatif (Putri and Kurniawan, 2022). Konsep-konsep ini secara kolektif membentuk landasan sistem ekonomi yang berupaya menyelaraskan aktivitas keuangan dengan nilai-nilai moral dan etika, memajukan keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan perilaku etis dalam masyarakat (Soemitra, 2020). Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan

kerangka ekonomi yang tidak hanya layak secara finansial tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Suadi and SH, 2017).

2.5 Lembaga Ekonomi Islam

Lembaga ekonomi Islam adalah komponen fundamental dari sistem ekonomi Islam, yang dirancang untuk mendorong aktivitas keuangan yang mematuhi prinsip dan nilai-nilai Islam (Akhmad Al Aidhi, 2023). Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam membentuk transaksi ekonomi dan mendorong praktik keuangan yang etis (Santoso and Tawangsari, 2016).

Perbankan dan lembaga keuangan Islam berada di garis depan lanskap ekonomi Islam. Beroperasi berdasarkan prinsip perbankan bebas bunga, menggantikan pinjaman tradisional berbasis bunga dengan mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam keuangan Islam, pinjaman dan investasi dilakukan dengan fokus pada penciptaan kekayaan yang etis dan adil. Konsep-konsep seperti Mudarabah (bagi hasil) dan Musharakah (kemitraan) merupakan bagian integral dari lembaga-lembaga ini, menekankan pembagian risiko dan kolaborasi antara lembaga keuangan dan klien (Shiddiq, 2021).

Sukuk, umumnya dikenal sebagai obligasi Islam, adalah komponen penting lainnya dari lembaga ekonomi Islam. Sukuk mewakili kepemilikan aset berwujud dan bukan utang, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam yang melarang obligasi berbunga. Instrumen keuangan ini memberikan peluang bagi individu dan institusi untuk berinvestasi dalam proyek dan usaha yang beretika dan sesuai syariah (Hakim, 2012).

Lembaga wakaf juga mempunyai tempat khusus dalam perekonomian Islam. Wakaf adalah wakaf yang

dilakukan oleh individu atau organisasi, dimana harta bendanya dipersembahkan untuk tujuan amal atau keagamaan (Mudhiiah, 2016). Aset wakaf dikelola oleh lembaga-lembaga ini, dan pendapatan yang dihasilkan dari dana abadi ini diarahkan untuk berbagai layanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Lembaga wakaf berfungsi sebagai sarana memberi kembali kepada masyarakat dan menjamin kesejahteraan masyarakat (Marthon, 2004).

Lembaga Zakat dan Shadaqah masing-masing bertanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan sedekah wajib dan sumbangan amal sukarela (Aryawati *et al.*, 2023). Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, memastikan bahwa yang membutuhkan menerima dukungan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Mudhiiah, 2016). Dana yang terkumpul disalurkan ke berbagai program kesejahteraan sosial, termasuk penyediaan makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu (Feliyani, 2021).

Lembaga ekonomi Islam membentuk kerangka yang kuat dalam sistem ekonomi Islam, memberikan alternatif yang etis dan sesuai syariah dibandingkan lembaga keuangan konvensional (Wakil *et al.*, 2022). Berkontribusi pada promosi kegiatan ekonomi yang mengutamakan kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Iqbal, 2012). Lembaga-lembaga ini tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi tetapi juga memenuhi misi sosial yang lebih luas dengan memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Misra, Hakim and Pramana, 2020).

2.6 Tantangan dan Solusi Kontemporer

Tantangan kontemporer dalam konteks ekonomi Islam mencerminkan lanskap global yang terus berkembang dan perlunya adaptasi dalam sistem ekonomi ini. Salah satu tantangan yang signifikan adalah dampak globalisasi. Ekonomi Islam menghadapi tugas untuk menyeimbangkan prinsip-prinsipnya dengan dinamika ekonomi global. Meskipun globalisasi menawarkan peluang bagi pertumbuhan ekonomi, globalisasi juga dapat menimbulkan tantangan dalam melestarikan nilai-nilai Islam dan standar etika dalam kegiatan ekonomi (Bakar, 2021).

Kelestarian lingkungan juga merupakan masalah mendesak lainnya (Sari *et al.*, 2023). Ketika dunia bergulat dengan isu-isu ekologi, ekonomi Islam berupaya menyelaraskan praktik ekonomi dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan (Rizkianto, 2020). Solusinya melibatkan pengintegrasian praktik ramah lingkungan dan investasi etis ke dalam kegiatan ekonomi, mendorong pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab (Siregar, 2015).

Kemajuan teknologi mengubah lanskap ekonomi (Rukmana, Priyana, *et al.*, 2023). Ekonomi Islam harus beradaptasi dengan era digital sambil memastikan bahwa inovasi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Harto *et al.*, 2022). Solusinya mencakup pengembangan solusi fintech yang beretika, platform keuangan syariah online, dan layanan perbankan digital yang mematuhi standar syariah (Ridlo, 2014).

Dalam ranah pemikiran ekonomi Islam, tantangan kontemporer memerlukan kontribusi para ekonom dan cendekiawan Islam modern (Harto *et al.*, 2023). Solusinya melibatkan melakukan penelitian dan beasiswa yang mengatasi masalah ekonomi terkini dari perspektif Islam.

Hal ini termasuk mengembangkan model ekonomi inovatif yang menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan kompleksitas dunia modern (Munte *et al.*, 2023).

Lembaga ekonomi Islam juga beradaptasi terhadap tantangan kontemporer dengan memperluas jangkauan dan layanannya. Solusinya melibatkan diversifikasi produk dan layanan keuangan Islam untuk memenuhi kebutuhan klien yang terus berkembang. Misalnya, lembaga-lembaga yang menawarkan portofolio investasi etis, opsi keuangan mikro Islam, dan layanan perbankan yang bertanggung jawab secara sosial (Hasan, 2018).

Tantangan kontemporer dalam ekonomi Islam berasal dari perubahan lanskap global (Baali *et al.*, 2023), termasuk globalisasi, permasalahan lingkungan, kemajuan teknologi (Rukmana, Rahman, *et al.*, 2023), dan kebutuhan akan pemikiran ekonomi modern (Wahdiniawati *et al.*, 2023). Solusinya adalah dengan menyeimbangkan prinsip-prinsip Islam dan tuntutan dunia modern (Setiawan *et al.*, 2023), memasukkan praktik-praktik etis ke dalam kegiatan ekonomi, mendorong keberlanjutan, memajukan ilmu ekonomi (Harinie *et al.*, 2023), dan memperluas jangkauan layanan keuangan Islam untuk memenuhi beragam kebutuhan ekonomi (Bakar, 2020). Upaya-upaya ini memastikan bahwa ekonomi Islam tetap relevan dan responsif terhadap tantangan lingkungan ekonomi yang saling terhubung dan berubah dengan cepat saat ini (Muhtadi *et al.*, 2023).

2.7 Studi Kasus dan Contohnya

Studi kasus dan contoh-contoh menjadi alat yang berharga dalam mengilustrasikan penerapan praktis prinsip dan konsep ekonomi Islam. Memberikan contoh nyata bagaimana ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam

skenario dunia nyata, dan menyoroti efektivitas prinsip-prinsip ini (Marthon, 2004).

Studi kasus terhadap lembaga perbankan Islam di negara-negara seperti Malaysia dan UEA menunjukkan bagaimana lembaga keuangan tersebut beroperasi dalam kerangka prinsip-prinsip syariah. Menawarkan layanan seperti pembiayaan berbasis Mudarabah dan Musharakah, yang menunjukkan bagaimana model bagi hasil dapat menggantikan pinjaman tradisional berbasis bunga. Studi kasus ini juga menyoroti pentingnya dewan syariah dalam memastikan kepatuhan produk keuangan terhadap etika Islam (Huda, 2013).

Bidang eksplorasi lainnya melibatkan sektor keuangan mikro Islam. Studi kasus dari negara-negara seperti Bangladesh dan Indonesia menunjukkan bagaimana lembaga keuangan mikro Islam memberikan pinjaman tanpa bunga kepada individu berpenghasilan rendah dan pengusaha kecil, mendorong inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip Syariah (Hasan, 2018).

Di bidang obligasi syariah (Sukuk), studi kasus dari negara-negara seperti Arab Saudi dan Qatar menunjukkan keberhasilan penerbitan Sukuk untuk membiayai proyek infrastruktur. Contoh-contoh ini menggambarkan bagaimana struktur Sukuk selaras dengan prinsip-prinsip Islam, memberikan peluang investasi yang etis bagi investor domestik dan internasional (Iqbal, 2012).

Studi kasus wakaf Islam menyoroti peran dalam mendukung lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan program kesejahteraan sosial. Contoh dari negara-negara seperti Turki dan Pakistan menunjukkan bagaimana aset Wakaf dapat dikelola secara efektif untuk memberikan kontribusi terhadap perbaikan masyarakat (Prasetyo, 2018).

Zona ekonomi Islam, seperti di Dubai dan Malaysia, memberikan studi kasus tentang bagaimana pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang menarik keuangan dan investasi Islam. Zona-zona ini menawarkan insentif pajak dan kerangka peraturan yang mendorong lembaga keuangan Islam untuk hadir, merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Marthon, 2004).

Studi kasus dan contoh dalam ekonomi Islam menawarkan wawasan praktis mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di berbagai domain (Ridwan and Saebani, 2013). Menunjukkan bagaimana keuangan Islam, keuangan mikro, Wakaf, Sukuk, dan zona ekonomi dapat beroperasi sesuai dengan standar syariah, mendorong praktik ekonomi etis dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sambil menunjukkan kemampuan beradaptasi dan relevansi ekonomi Islam dalam beragam konteks (Subarman, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Al Aidhi, M.A.K.H.A.Y.R. 2023. 'Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui peranan Inovasi', *Jurnal Multidisiplin West Science* [Preprint]. Available at: <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jmws/article/view/229/160> (Accessed: 28 February 2023).
- Al-Qaradhwai, Y. 2022. *Norma dan etika ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Aryawati, N.P.A. et al. 2023. 'Manajemen keuangan', *Penerbit Tahta Media* [Preprint].
- Baali, Y. et al. 2023. *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN: KONSEP DAN APLIKASI BISNIS*. Get Press Indonesia.
- Bakar, A. 2020. 'Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4(2), pp. 233–249.
- Bakar, A.A. 2021. 'Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah', *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 3(2), pp. 118–124.
- Djuniardi, D. et al. 2023. *MANAJEMEN PEMASARAN: TEORI DAN PRAKTIK MENCIPTAKAN LOYALITAS PELANGGAN*. Get Press Indonesia.
- Fahlevi, R. et al. 2023. *Psikologi Kepemimpinan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Feliyani, N. 2021. 'Manajemen Ekonomi Syariah dalam Fungsi-Fungsi Bisnis Islam', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), pp. 84–97.
- Furqon, A. 2015. 'Manajemen zakat', *Semarang: CV Karya Abadi Jaya* [Preprint].
- Ghofur, A. 2020. 'Pengantar Ekonomi Syariah: konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah'.

- Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani.
- Hakim, C. *et al.* 2023. 'The Influence of Entrepreneurship Intellectual Capital in The Contribution to Economic Growth in The City of Bandung', *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 1(02), pp. 68–76.
- Hakim, L. 2012. 'Prinsip-prinsip ekonomi islam'. Jakarta: Erlangga.
- Harinie, L.T. *et al.* 2023. *PEMASARAN TERPADU*. Get Press Indonesia.
- Harto, B. *et al.* 2022. 'Bibliometric Analysis of Transforming Leadership Education with Artificial Intelligence', in *1st Virtual Workshop on Writing Scientific Article for International Publication Indexed SCOPUS*. Sciendo, pp. 385–390. Available at: <https://doi.org/10.2478/9788366675827-067>.
- Harto, B. *et al.* 2023. *TRANSFORMASI BISNIS DI ERA DIGITAL: Teknologi Informasi dalam Mendukung Transformasi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hasan, M. 2002. *HISTORY OF ISLAM (2 Vols. Set)*. Adam Publishers.
- Hasan, M. 2018. 'Pembinaan ekonomi kreatif dalam perspektif pendidikan ekonomi', *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan (JEKPEND) Vol, 1*.
- Huda, C. 2013. 'Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), pp. 103–124.
- Iqbal, I. 2012. 'Pemikiran Ekonomi Islam tentang uang, harga dan pasar', *Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak*, 2(1).
- Istiqomah, L. 2019. 'Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam', *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), pp. 1–19.

- Kasdi, A. 2017. 'Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif'. Idea Press Yogyakarta.
- Marthon, S.S. 2004. 'Ekonomi Islam di tengah krisis ekonomi global', *Jakarta: Zikrul Hakim* [Preprint].
- Misra, I., Hakim, S. and Pramana, A. 2020. 'Manajemen risiko pendekatan bisnis ekonomi syariah'. K-Media.
- Mudhiiah, K. 2016. 'Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik', *IQTISHADIA*, 8(2).
- Mufraini, M.A. 2006. *Akuntansi dan manajemen zakat*. Prenadamedia Group.
- Muhtadi, R. et al. 2023. *MENELUSURI JEJAK SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM*. Get Press Indonesia.
- Munte, R.N. et al. 2023. *EKONOMI*. Global Eksekutif Teknologi.
- Prasetyo, Y. 2018. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group.
- Putri, F. and Kurniawan, R.R. 2022. 'Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq'.
- Razali, G. et al. 2023. 'Loyalty and the Effects of Trust and Switching Barriers', *Jurnal Mirai Management*, 8(1), pp. 237–248.
- Ridlo, A. 2014. 'zakat dalam perspektif Ekonomi Islam', *Al-'Adl*, 7(1), pp. 119–137.
- Ridwan, A.H. and Saebani, B.A. 2013. 'Manajemen Baitul mal watamwil'.
- Rijal, S. et al. 2023. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Global Eksekutif Teknologi.
- Rizkianto, A. 2020. 'Kepemimpinan Karismatik HOS Tjokroaminoto di Sarekat Islam', *Inteleksia-Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 2(1), pp. 55–80.

- Rukmana, A.Y. 2023. 'Achieving Access to External Finance Among Indonesian Entrepreneurs Through Financial Literacy, Financial Inclusion, Availability of Collateral, and Government Policy: A Study on Large Industrial Entrepreneurs in West Java', *The ES Accounting And Finance*, 1(02), pp. 61–71.
- Rukmana, A.Y., Priyana, Y., *et al.* 2023. 'Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Ekosistem Kewirausahaan: Studi Kasus Inkubator Bisnis di Indonesia', *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 1(03), pp. 216–225.
- Rukmana, A.Y., Rahman, R., *et al.* 2023. *PENGANTAR SISTEM INFORMASI: Panduan Praktis Pengenalan Sistem Informasi & Penerapannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sahroni, O. *et al.* 2018. 'Fikih Zakat Kontemporer'.
- Santoso, S. and Tawang Sari, K. 2016. *Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer*. State Islamic Institute of Tulungagung.
- Sari, A.R. *et al.* 2023. 'The Impact Of Work Communication And Discipline On Employee Performance', *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 2(3), pp. 9–22.
- Setiawan, Z. *et al.* 2023. *Kewirausahaan Digital*. Global Eksekutif Teknologi.
- Shiddiq, N.K.A.B.A. 2021. 'SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ZAMAN KHULAFAR RASYIDIN', *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, p. 25.
- Siregar, D., Yuslem, N. and Nawawi, Z.M. 2023. 'Strategy for Strengthening Business Incubators to Form an Entrepreneurial Spirit in Islamic University', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), pp. 162–173.

- Siregar, R. 2015. 'Peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ditinjau dari hukum ekonomi Islam', *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(1), pp. 220–243.
- Soemitra, A. 2020. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis Kontemporer*. Prenada Media.
- Suadi, H.A. and SH, M. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi*. Kencana.
- Subarman, M. 2015. *Sejarah Kelahiran, Perkembangan dan Masa Keemasan Peradaban Islam*. Deepublish.
- Tantowi, H.A. 2022. *Pendidikan Islam di era transformasi global*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Wahana, A.N.P.D. and Rukmana, A.Y. 2023. 'Unveiling the 'Pesantrenpreneur' Phenomenon: Nurturing Entrepreneurship within Islamic Boarding Schools', *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, 1(03), pp. 171–180.
- Wahdiniawati, S.A. et al. 2023. *ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM*. Get Press Indonesia.
- Wakil, A. et al. 2022. *Transformasi Digital Dalam Dunia Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.
- Waluyo, B.P. et al. 2023. *Studi Kelayakan Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.

BAB 3

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI

SYARIAH

Oleh Sri Nawatmi

3.1 Pendahuluan

Perekonomian dunia telah menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Krisis ekonomi terus berulang dalam 20-an tahun terakhir. Setelah *great depression* tahun 1930-an, krisis yang dampaknya dialami berbagai negara adalah krisis moneter tahun 1998, yang dimulai dari melemahnya mata uang Thailand (bath), kemudian menjalar ke berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Indonesia mengalami dampak yang terparah di banding negara-negara lainnya karena krisis tersebut berkembang menjadi krisis multidimensi. Belum sampai krisis tersebut terselesaikan, pada tahun 2008 muncul lagi krisis yang sangat besar di Amerika yaitu krisis keuangan. Krisis tersebut berkembang menjadi krisis keuangan global karena banyak negara yang terkena dampaknya. Awal krisis keuangan global di mulai dari macetnya kredit perumahan yang diberikan pada masyarakat Amerika yang sebenarnya tidak layak mendapat kredit perumahan sehingga mereka dibebani dengan bunga yang tinggi. Harapannya, seandainya nanti mereka gagal bayar, rumah tersebut bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi sehingga bisa menutup kerugian karena pada saat itu harga tanah dan bangunan cenderung meningkat. Ternyata, pada saat banyak masyarakat gagal bayar, harga tanah dan bangunan turun, padahal kredit tersebut di *backup* lima

saham. Akhirnya saham-saham yang dijual di berbagai negara tersebut harganya berjatuhan, muncullah krisis keuangan global akibat *sub prime mortgage*. Hampir semua negara terkena dampak dari krisis Amerika tersebut, bahkan perekonomian seluruh Eropa melemah kecuali Inggris dan Jerman. Begitu pula yang dialami oleh negara-negara maju lainnya. Banyak orang-orang kaya yang bunuh diri karena tiba-tiba miskin mendadak. Adanya globalisasi menjadikan krisis di suatu negara (negara dengan ekonomi besar) akan berdampak pada negara-negara lainnya di dunia.

Belum pulih dari krisis 2008, muncul pandemi covid-19 dimulai dari Cina pada Desember 2019. Mobilitas manusia yang tinggi ke berbagai negara, sementara penularan lewat percikan pernafasan (droplet) maka penularannya sangat cepat sehingga wabah tersebut melanda ke berbagai negara di dunia. Akibat covid-19, Banyak usaha yang tutup karena adanya pelarangan dari pemerintah untuk berkumpul-kumpul. Kebutuhan masyarakat dibeli lewat online, sehingga usaha yang offline banyak yang berguguran. Perusahaan-perusahaan dibatasi operasionalnya, jadi wajar kalau banyak orang yang menganggur karena kehilangan pekerjaan. Sebelum pulih dari dampak covid-19, terjadi perang Rusia-Ukraina, yang memunculkan krisis energi di berbagai negara di Eropa akibat tindakan Rusia yang dilakukan untuk membalas sanksi yang dikenakan NATO pada Rusia.

Krisis ekonomi yang terjadi berturut-turut, ditambah banyaknya kemiskinan yang terjadi di berbagai negara, diikuti dengan adanya ketimpangan pendapatan yang tajam karena berbagai kebijakan yang tidak adil, defisit neraca pembayaran yang besar, cicilan hutang dan bunga yang tidak mampu dibayar karena kemiskinan atau perilaku korup yang menjalar pada berbagai kalangan menjadikan

perekonomian dunia sulit untuk membaik. Tak ada teori ekonomi terdahulu yang tampaknya mampu menjelaskan krisis ekonomi dunia saat ini (Chapra, 2000).

Adanya krisis ekonomi dunia yang terus berulang meski sudah diperbaiki sistem ekonominya, menjadikan ekonom dunia berpikir untuk mencari alternatif dari sistem ekonomi kapitalis menjadi sistem ekonomi yang sesuai dengan aliran masing-masing ekonom, termasuk ekonom Islam. Ekonom Islam memandang, berdasar sejarah Islam, bahwa di masa Nabi, kemudian dilanjutkan para sahabat, kondisi ekonomi masyarakat sejahtera. Bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz, sulit menemukan orang yang layak untuk dizakati, karena masyarakatnya semuanya sejahtera dengan menerapkan ekonomi Islam, kecuali khalifahnyanya yaitu Umar bin Abdul Aziz (cucu dari Umar bin Khatab).

Sejarah membuktikan bahwa diterapkannya ekonomi Islam bisa mensejahterakan rakyat. Itu yang diusung oleh ekonom muslim untuk menerapkan ajaran Islam secara kaffah (menyeluruh) termasuk dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Akan tetapi, masih banyak muslim sendiri yang skeptis dengan gagasan ekonomi Islam, mereka butuh bukti, padahal sejarah telah membuktikan keberhasilan ekonomi Islam dalam mensejahterakan masyarakatnya (Antonio, 2003).

Dalam Qur'an juga telah disebutkan tentang adanya kerusakan yang terjadi karena ulah manusia baik di darat maupun di laut (QS ar-Rum: 41). Sebenarnya dunia dan seisinya yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup untuk manusia, tetapi karena ketamakan manusia, dunia menjadi tidak cukup sehingga kerusakan terjadi dimana-mana.

Helmut Schmidt (1974), mantan kanselir Jerman Barat sudah lama juga mensinyalir bahwa perekonomian

global memasuki era ketidakstabilan yang luar biasa yang menyebabkan adanya ketidakpastian.

Fenomena perekonomian dunia yang seperti itu sebenarnya mengindikasikan ada sesuatu yang salah dari sistem ekonomi yang dianut selama ini. Tidak mungkin sistem perekonomian itu dikatakan baik kalau dampaknya merusak atau merugikan banyak masyarakat. Dan sebenarnya hal itu disadari oleh para ekonom yang konsen dengan masalah perekonomian dunia. Masalahnya, mau diganti dengan sistem ekonomi yang seperti apa? Hal itu masih menjadi PR bagi masyarakat global, khususnya para pembuat kebijakan.

Kalau Islam betul-betul diterapkan dalam seluruh sendi kehidupan umat Islam maka kesejahteraan akan didapatkan, sebagaimana yang terjadi pada masa sahabat (empat Khalifah), masa Tabi'in maupun Tabi'ut Tabi'in (masa salafus sholeh) karena Islam adalah agama yang di ridhoi, agama yang akan membawa manusia memperoleh kebahagiaan dunia dan akherat jika umat manusia bertaqwa. Tidak mungkin Allah yang Maha Suci memerintahkan sesuatu yang buruk untuk manusia. Artinya semua yang diperintahkan Allah Ta'ala itu mesti sesuatu yang baik bagi manusia dan sebaliknya, jika itu larangan maka hal itu mesti buruk bagi manusia. Sayangnya tidak semua umat muslim tunduk patuh pada ajaran Islam, sehingga yang terjadi adalah seperti sekarang ini, yaitu masalah yang terus menerus terjadi, khususnya yang kita bicarakan yaitu masalah ekonomi.

Kenapa ekonomi Islam menjadi pilihan yang menjanjikan kehidupan ekonomi yang lebih baik?

Ekonomi Islam menurut Rivai dan Buchari (Rivai, & Buchari, 2009) adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam

kerangka syariah Islam. Syarat utama dari ekonomi Islam adalah harus memasukkan nilai-nilai Islam dalam ilmu ekonomi.

Menurut Mannan (Mannan, 1993), ekonomi Islam merupakan bagian dari ilmu sosial yang khususnya menjelaskan mengenai permasalahan ekonomi masyarakat dengan menggunakan pendekatan syariah Islam.

Islam itu sendiri merupakan agama yang lengkap (komprehensif) dan universal. Dikatakan komprehensif karena Islam isinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dimana kegiatannya meliputi ibadah atau ritual dan juga muamalah atau sosial. Artinya dalam kehidupan ekonomi yang merupakan bagian dari muamalah, Islam sudah mengatur bagaimana melakukan kegiatan ekonomi dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip Islam sesuai dengan Qur'an dan Hadits. Sedangkan makna dari kata universal adalah syariah dalam Islam itu dapat dipraktekkan pada tempat dan waktu sampai akhir kehidupan manusia (Antonio, 2003).

Dalam Islam ada lima hukum yang harus dipahami oleh siapapun yang beragama Islam sehingga bisa selamat dari pelanggaran aturan agama. Kelima hukum tersebut adalah wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Dalam hadits dikatakan jika seseorang ingin selamat ikutilah sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu pasti sejalan dengan Qur'an, sehingga di ridhoi Allah Ta'ala. Dengan demikian bisa dikatakan jika ingin selamat jadikan Islam sebagai *way of life*. Masuklah Islam secara kaffah (menyeluruh). Jika kita konsisten dengan ajaran agama Islam maka tatanan kehidupan akan menjadi lebih baik (an-Nahl: 97). Jika dalam kehidupan kita menolak ajaran Islam maka, yang terjadi adalah kekacauan atau kehidupan kita menjadi terasa sempit dan akan celaka dalam kehidupan di akherat nanti (Thaha: 124-126).

3.2 Nilai-Nilai Dari Sistem Perekonomian Syariah Islam

Sistem ekonomi sosialis dan kapitalis yang gagal mewujudkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan sistem pengganti yang lebih baik, yang mampu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menjadi pengganti terbaik, dimana dalam sistem ekonomi Islam berlandaskan pada Al-Qur'an serta hadits, yang mengandung nilai-nilai dari persaudaraan, rasa cinta, bagaimana menghargai waktu maupun kebersamaan. Menurut Antonio (Antonio, 2003), sistem ekonomi syariah Islam mengandung nilai-nilai:

1. Perekonomian masyarakat secara umum, bukan hanya muslim akan menjadi baik jika menerapkan norma-norma yang dianut Islam

Ayat-ayat yang terdapat pada al-Baqarah: 60 dan 168 serta al-Maidah: 87-88, merupakan dalil dalam bermuamalah di bidang ekonomi. Pada ayat-ayat tersebut, syariah Islam memotivasi seluruh muslim untuk menikmati apa yang telah disediakan Allah untuk umat manusia dengan cara mendayagunakan guna meningkatkan pertumbuhan baik yang bersifat material maupun immaterial. Islam sekaligus juga memotivasi para pengikutnya agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan perjuangan yang tidak melanggar syariah Islam, misalnya, untuk mendapatkan sesuatu dengan jalan yang halal dan thoyyib (baik), bukan cara yang batil, tidak melakukan kezaliman juga tidak berlebihan, menghindari transaksi-transaksi yang dilarang Islam riba, maisir dan gharar maupun transaksi yang haram. Demikian juga umat Islam tidak boleh melupakan tanggung jawab sosial (zakat, infaq dan shodaqoh). Hal itulah yang menunjukkan adanya

perbedaan antara sistem ekonomi syariah dengan konvensional (yang memakai prinsip *self interest* atau *kepentingan pribadi*). Islam mendorong pengikutnya untuk bekerja bukan meminta-minta. Islam dirancang untuk *rahmatan lil alamin*, menjadikan keluarga yang sejahtera dan bernilai, bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sementara sistem kapitalis mengarah ke efisiensi produksi sedangkan sistem sosialis ke pemerataan ekonomi. Padahal kedua hal tersebut jelas mengabaikan kebutuhan paling mendasar bagi manusia yaitu kebutuhan spiritual.

2. Nilai Keadilan dan Persaudaraan secara Menyeluruh

Tujuan dari syariah Islam adalah membangun tatanan sosial yang solid yang diikat persaudaraan dan kasih sayang sebagaimana sebuah keluarga. Dalam syariah Islam, keadilan implikasinya 1) keadilan sosial artinya semua manusia dihadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama, yang membuat perbedaan antar manusia adalah ketaqwaannya. Perlakuan adil akan membawa ke kesejahteraan. 2) Keadilan ekonomi. Artinya, masing-masing orang akan memperoleh hak sebanding dengan kontribusinya. Manusia dilarang mengambil hak orang lain dan juga tidak boleh melakukan eksploitasi.

3. Keadilan distribusi pendapatan.

Tidak boleh ada monopoli kecuali monopoli oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah harus menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi semua pelaku ekonomi agar bisa ikut aktif dalam proses ekonomi (baik dalam hal produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi). Harus ada jaminan untuk memenuhi kebutuhan mendasar bagi setiap orang dan harus ada juga jaminan sosial bagi yang tidak mampu agar mereka bisa mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan ekonominya. Dalam Islam, seseorang dibolehkan untuk

kaya, dengan catatan kekayaannya diperoleh dengan cara yang halal dan tidak lupa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu zakat, infaq, shodaqoh untuk kemaslahatan umat manusia, serta tidak boleh sombong dengan kekayaannya. Jika itu semua diterapkan dalam kehidupan setiap muslim maka, kesenjangan pendapatan yang tajam antar kelompok masyarakat tidak akan terjadi sehingga kehidupan masyarakat akan berjalan harmonis.

4. Ada Kebebasan Individu dalam Koridor Kesejahteraan Sosial.

Hukum asalnya, manusia itu lahir merdeka. Masing-masing orang bebas melakukan apapun selama tidak melanggar syariah Islam. Dengan tidak dibolehkannya melanggar syariah adalah demi kepentingan manusia itu sendiri pada saat nanti dimintai pertanggungjawabannya di akherat, di hadapan Allah Ta'ala. Terkait hak masing-masing orang dalam kehidupan bermasyarakat, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: setiap orang harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi; melepas kesulitan harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan memberikan manfaat; demi menghilangkan yang kecil menyebabkan kerugian yang lebih besar, tidak dapt diterima; tidak boleh, demi mendapat manfaat yang kecil, mengurbankan manfaat yang lebih besar. Dan juga, demi menghindari dari bahaya yang lebih besar, maka bahaya yang kecil harus diambil.

Syariah Islam mengakui kebebasan individu, dengan catatan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Menurut MUI dan BI (Bank Indonesia, 2018), nilai-nilai ekonomi Islam bukan konsep yang eksklusif, hanya untuk muslim saja tetapi juga untuk semua umat (inklusif). Syariah Islam sangat mendukung prinsip keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam mengelola sumber daya yang dititipkan Allah Ta'ala untuk kemaslahatan umat. Hasil diskusi antara MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan BI (Bank Indonesia) sebagai otoritas moneter, menganggap bahwa nilai-nilai ekonomi Islam ada 4, yaitu:

1. Kepemilikan

Pada hakekatnya segala sesuatu yang ada adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola sesuai kehendak Allah Ta'ala (QS al-Baqarah:30 dan 195; QS Ali Imron: 180). Sebenarnya, kekayaan yang dimiliki manusia pada hakekatnya bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga mengandung kepentingan sosial berupa zakat, infaq dan shodaqoh.

Kenapa ada kepentingan sosial karena semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah sehingga harus digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik langit dan bumi. Tidak mungkin manusia memiliki sesuatu kalau tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Apa yang dijanjikan oleh Allah adalah suatu kebenaran, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya sebagaimana yang dinyatakan dalam QS Yunus: 55.

Dalam al-Baqarah: 195 juga menyebutkan bahwa harta benda yang kita miliki harus dibelanjakan sesuai dengan perintah Allah, kita tidak boleh melakukan tindakan yang membinasakan, dan kita diperintahkan untuk berbuat baik karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. .

2. Melakukan usaha yang berkeadilan

Dalam QS al-Jumu'ah: 10; QS al - Isra 12; QS an-Nahl: 14, menyebutkan bahwa manusia didorong untuk berusaha. Manusia juga diminta untuk memiliki kemampuan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang disediakan oleh Allah Ta'ala (QS al-Baqarah: 29; QS Ibrahim:34).

Dalam Qur'an surah al-Humazah: 1-3, juga menyebutkan ancaman, celaka bagi manusia yang suka mengumpat dan mencela, yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung kekayaan dengan mengira bahwa harta tersebut dapat mengekalkannya.

Dengan demikian, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus didorong untuk berusaha dengan memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia, tetapi jangan sampai harta membuat kita serakah yang akan menjadikan kita celaka.

Manusia juga dilarang saling memakan harta antar sesama dengan cara yang melanggar aturan syariah, untuk mendapatkan harta melalui jalan perniagaan dengan syarat suka sama suka. Manusia juga dilarang untuk membunuh dirinya sendiri sebagaimana yang dinyatakan dalam QS an-Nisa: 29.

3. Kerjasama untuk kebaikan.

Kegiatan ekonomi dalam syariah Islam boleh dilakukan secara individual atau kelompok (berjama'ah) yang didorong nilai-nilai Islam. Jika berjama'ah, menurut Qur'an Surah al-Maidah: 2, dasarnya adalah kerjasama dan tolong-menolong untuk kebaikan dan keadilan (QS shaad: 24). Persaingan di dalam kegiatan ekonomi juga bersifat positif, yaitu fastabiqul khoirot atau berlomba dalam kebaikan (QS al-Baqarah: 148 dan QS al-Maidah: 48).

4. Adanya Pertumbuhan

Pertumbuhan yang dimaksud adalah Pertumbuhan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi yang terjadi harus mencerminkan adanya keseimbangan dalam konteks spiritual dan alam yang lestari tetap terjaga (QS al-Baqarah: 11-12).

Hal tersebut selaras dengan tujuan diciptakannya manusia. Manusia diciptakan hanya untuk beribadah pada Allah Ta'ala dan memberikan manfaat banyak terhadap alam semesta sebagaimana disebutkan di QS al-Anbiya: 107 dan QS al-ankabut: 51.

Seiring waktu, nilai-nilai ekonomi Islam telah berjalan selaras dengan berbagai tujuan yang dirumuskan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Kelestarian alam harus tetap terjaga dan juga berkesinambungan secara menyeluruh untuk kepentingan masyarakat dunia sebagaimana yang dinyatakan SGDs (*Sustainable Development Goals*).

3.3 Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Kelemahan dari sistem ekonomi konvensional harus diatasi secara mendasar, bukan sekedar kosmetik, sehingga diharapkan bisa memecahkan masalah ekonomi yang ada, memberikan harapan bagi masyarakat bahwa dengan digantikannya sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi yang baru akan menjadikan perekonomian berjalan lebih baik (lancar). Dengan demikian kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi. Oleh karena itu, jika ekonomi syariah dijadikan sebagai alternatif maka, konsep ekonomi syariah harus diterapkan secara mendasar. Dengan demikian, perubahan secara mendasar diperlukan, dimulai dari tatanan filosofi yang akan membentuk teori

ekonomi syariah, yang nantinya akan terbentuk prinsip-prinsip ekonomi syariah, secara otomatis kemudian di masyarakat akan terbentuk perilaku Islami dalam menjalani kehidupan ekonomi dan bisnis (Rivai & Buchari, 2009).

Prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi pegangan dalam membangun ekonomi syariah. Dasar Perekonomian syariah adalah lima nilai-nilai universal yaitu tauhid (keimanan), ad'l (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Dalam menyusun ekonomi syariah menggunakan pedoman kelima nilai tersebut. Penerapan ekonomi syariah dalam perekonomian menjadikan sistem ekonomi baik dan kuat. Jika hal tersebut terjadi maka, akan memberikan dampak positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Umsu, 2021).

Prinsip dasar ekonomi Syariah menurut kesepakatan MUI dan BI ada 6 prinsip, yaitu:

1. Prinsip pertama: harta individu dikendalikan

Ada pengendalian kepemilikan relatif atas harta. Harta yang dikendalikan tersebut diharapkan bisa dikembangkan dengan melakukan investasi. Prinsip ini sejalan dengan konsep zakat. Adanya perintah zakat bisa mendorong dan memaksa harta yang bertumpuk untuk keluar dan masuk ke dalam kegiatan ekonomi. Harta tersebut bisa berwujud investasi produktif di sektor riil. Bisa juga berupa aliran infak, shodaqoh dan wakaf yang digunakan untuk kepentingan publik. Aliran dana yang berasal dari zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yang mengalir ke perekonomian jika tetap terjaga akan menjadikan kegiatan ekonomi bisa terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

2. Prinsip kedua: Distribusi kekayaan dan pendapatan

Distribusi pendapatan dan kekayaan harus diatur dengan mekanisme tertentu agar bisa menjamin daya beli seluruh lapisan masyarakat (inklusifitas). Distribusi

pendapatan dan kekayaan diatur dalam konsep zakat berdasar QS at-Taubah: 60. Orang yang memiliki kekayaan dan telah mencapai nishob terkena kewajiban untuk berzakat. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (delapan golongan). Adanya zakat diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat bawah sehingga secara keseluruhan, konsumsi tetap terjaga. Jika hal tersebut terus terjadi maka, sektor produksi akan terus tumbuh dan berkembang. Dengan demikian perputaran kegiatan ekonomi tetap bisa berlangsung.

3. Prinsip ketiga: Berinvestasi secara optimal dan berbagi risiko

Prinsip ini sejalan dengan instrumen pelarangan riba. Berinvestasi dengan akad berbagi risiko (dengan akad mudharabah atau musyarakah) bisa menghapuskan kebiasaan masyarakat yang terbiasa melakukan kegiatan ekonomi dengan sistem ribawi. Sistem ribawi yang selama ini hidup di masyarakat menyebabkan ketidakberkahan karena melanggar syariah. Perekonomian yang tidak diberkahi tidak bakal berjalan lancar, pasti akan menghadapi berbagai masalah sebagaimana yang terjadi selama ini.

4. Prinsip keempat: Berinvestasi secara produktif

Prinsip keempat berarti tidak melakukan maysir (*gambling*). Maysir adalah kegiatan yang membutuhkan modal dengan berharap mendapat keuntungan yang bersifat spekulatif. Dengan demikian aktivitas yang bersifat maysir tidak berhubungan dengan sektor riil sehingga tidak memberikan manfaat bagi perekonomian. Oleh karena itu, maysir tidak akan menambah penawaran barang dan jasa seperti yang terjadi jika kita berinvestasi.

Oleh karena itu, Allah Subhanu wa Ta'ala melarang maysir karena tidak bermanfaat, dan Allah Ta'ala

mendorong investasi yang produktif karena bisa mendorong sektor perekonomian untuk tumbuh dan berkembang.

5. Prinsip kelima: Partisipasi dalam kegiatan sosial untuk kepentingan publik

Dalam prinsip ini, di samping mendorong investasi agar lebih optimal dan produktif, ekonomi syariah Islam juga mendukung adanya partisipasi masyarakat untuk kepentingan publik (umum). Dengan demikian, masyarakat didorong untuk berinfak, bersedekah dan memberikan wakaf sehingga bisa memicu pertumbuhan ekonomi.

Adanya penggalangan dana dari masyarakat berupa infak, shodaqoh dan wakaf bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, melakukan pemberdayaan pada masyarakat, dan jika ada bencana bisa dilakukan antisipasi sehingga bisa menghemat biaya.

6. Prinsip keenam: Melakukan transaksi berdasar kerjasama yang berkeadilan, terbuka, tidak dzolim, tidak membahayakan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, terbuka dan tidak mengandung unsur yang haram. Transaksi ekonomi dikatakan sesuai dengan syariah jika mengikuti aturan yang diterapkan dalam Islam. Jika aturan tersebut ditaati oleh masing-masing pelaku ekonomi maka akan berdampak positif bagi kehidupan perekonomian.

Dalam prinsip keenam, semua kegiatan terkait transaksi-transaksi harus transparan artinya tidak ada gharar (ketidakjelasan). Transaksi yang sesuai dengan syariah Islam tidak ada unsur yang membahayakan maupun unsur yang haram dan juga tidak boleh ada kedzoliman.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam semua transaksi ekonomi yang dilakukan akan memudahkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan. Para pelaku ekonomi bukan hanya mengejar materi saja tetapi juga memenuhi kebutuhan spiritual (Mursal, 2015).

3.4 Penutup

Islam adalah agama yang lengkap (komprehensif) dan bersifat universal. Diperintahkannya umat manusia untuk memeluk agama Islam demi kebahagiaan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akherat. Jika umat manusia menjadikan Islam sebagai jalan hidup maka akan terjamin keharmonisan antara kebutuhan materiil dan spiritual. Dengan demikian, keadilan sosioekonomi dan persaudaraan akan mudah terwujud dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, masyarakat sangat perlu untuk didorong atau dimotivasi agar memiliki kesadaran untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam setiap aktivitas ekonominya. Reformasi ekonomi dan reorganisasi sangat penting untuk kebangkitan ekonomi syariah. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan tokoh-tokoh intelektual muslim agar Islam sebagai rahmatan lil alamin segera bisa terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. 2003. *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Bank Indonesia. (n.d.). *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, berbagai terbitan*. Bank Indonesia. www.bi.go.id
- Chapra, M. U. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani Press dan tazkia Cendikia.
- Mannan, M. A. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*. PT Dana Bhakti Wakaf.
- Mursal, M. 2015. *Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*. 1(1).
- Rivai, Veithzal, & Andi Buchari. 2009. *Islamic Economics-Ekonomi Syariah Bukan Opsi Teteapi Solusi* (1st ed.). PT Bumi Aksara.
- Umsu, U. 2021. Prinsip Ekonomi Islam dan Konsep Islam dalam Membasmi Kemiskinan. [Https://Feb.Umsu.Ac.Id](https://Feb.Umsu.Ac.Id).

BAB 4

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Oleh Aminah Lubis

4.1 Pendahuluan

Keuangan syariah adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan keuangan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Untuk melaksanakan manajemen keuangan berdasarkan syariah Islam dengan baik maka diperlukan landasan berupa akidah yang kokoh. Landasan akidah yang kokoh tersebut sesuai dalam surah Adz-dzariyat ayat 56 yaitu *Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku*. Dan dalam Surah Al-Baqarah ayat 2 yaitu *Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa*. Berdasarkan kedua ayat tersebut seseorang akan dapat menjalankan aktivitas manajemen keuangan syariah apabila ia menggunakan akidah yang kokoh sehingga tidak mengikuti keinginan dan hawa nafsunya. Akidah yang kokoh akan terlihat pada prinsip mempunyai keyakinan dan berharap hanya kepada Allah Ta'ala, membatasi sumber rujukan dalam masalah keuangan syariah hanya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga menolak ajaran ekonomi dan pemikiran ekonomi selain yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti ekonomi kapitalis yang telah mempengaruhi umat Islam. Sebagai sistem pengelolaan keuangan, tujuannya adalah untuk mentransfer dana nasabah yang disimpan di lembaga pengelola keuangan kepada pengguna dana. Dari

segi prinsip keuangan, hal ini tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan konvensional. Namun, dalam beberapa aspek keuangan berbasis syariah berbeda dengan keuangan konvensional. Pengelolaan keuangan berbasis syariah merupakan bagian dari operasional perusahaan dan kini memegang peranan yang sangat penting. Pengelolaan keuangan perusahaan yang berhasil akan membawa keberhasilan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan sangat membantu keberhasilan usaha, oleh karena itu keberadaan pengelolaan keuangan memberikan tantangan dalam pengelolaan dana usaha sesuai Al-Quran dan Sunnah Islam. Manajer keuangan harus memahami prinsip keuangan syariah ketika menganalisis keuangan perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat.

4.2 Teori Manajemen Keuangan Syariah

4.2.1 Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan Syariah merupakan pengaturan kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan dalam manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan dan pengendalian keuangan. orang yang melaksanakan kegiatan manajemen keuangan disebut sebagai manajer keuangan. Seorang manajer keuangan dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan menegani analisis bisnis, investasi, dan surat-surat berharga. sehubungan dengan hal ini, perlu memiliki pengetahuan tentang peraturan dan karakteristik bisnis, investasi bisnis, surat berharga, mengatur tingkat resiko dan setiap investasi serta memperkirakan harga saham (surat berharga) di masa yang akan datang. manajemen keuangan syariah bisa

diartikan sebagai manajemen fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah islam yang berkaitan dengan masalah-masalah keuangan perusahaan. secara garis besar fungsi-fungsi perusahaan bisa dikelompokkan kedalam empat fungsi, yaitu: fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi dan fungsi personalia.

4.2.2 Esensi Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syari'ah adalah aktivitas termasuk kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syari'ah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syari'ah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan prinsip syariah(Dadang Husen Sobana,2018).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan urusan keuangan sesuai syariah adalah ((Dadang Husen Sobana, 2018):

1. Segala upaya untuk memperoleh properti harus dilakukan berdasarkan hukum syariah, seperti perdagangan/penjualan, pertanian, industri atau jasa;
2. Benda yang kita kerjakan bukanlah sesuatu yang haram
3. Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang/diperbolehkan seperti pembelian barang konsumsi, hiburan, dan lain-lain. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan/sunnah, seperti infak, infak, sedekah. Digunakan untuk hal-hal wajib seperti zakat.
4. Dalam menginvestasikan uang, terdapat prinsip bahwa "uang adalah alat tukar, bukan barang dagangan": yang

dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga perantara seperti bank syariah dan pasar modal syariah

Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi utama suatu perusahaan. fungsi manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

1. Perencanaan (*planning*)
2. Organisasi
3. Rekrutmen
4. Melakukan
5. Mengontrol

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan syariah dapat dipahami sebagai perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pelaksanaan dan pengendalian fungsi keuangan yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

4.2.3 Karakteristik Manajemen Keuangan Syariah

Direktorat perbankan syariah BI menguraikan tujuh karakteristik utama yang menjadi prinsip Sistem Perbankan Syariah di Indonesia yang menjadi landasan pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan bagi nasabah yang telah loyal. Tujuh karakteristik yang diterbitakan dan diedarkan berupa booklet Bank Syariah, yaitu sebagai berikut(Zaim Saidi,2010):

1. Universal, memandang bahwa Bank Syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi ataupun perbedaan agama.
2. Adil, memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur maysir (unsur spekulasi atau untung-untungan), gharar (ketidakjelasan), haram, riba.
3. Transparan, terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Seimbang, mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor real dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
5. Maslahat, bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan.
6. Variatif, produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual-beli dan sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa pembayaran (debet *card*, syariah *charge*).

4.2.4 Fungsi manajemen keuangan syariah

Fungsi manajemen keuangan syariah yang berkaitan dengan keputusan keuangan mencakup tiga fungsi utama, yaitu: keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan pembagian keuntungan atau dividen. Setiap keputusan harus diarahkan pada pencapaian tujuan perusahaan. Dengan tercapainya tujuan perusahaan maka akan meningkatkan nilai perusahaan secara optimal. Nilai perusahaan akan tercermin dari tingginya harga saham, sehingga akan meningkatkan kekayaan pemegang sahamnya. Dalam konteks hukum syariah, jika pemegang saham mencapai kesejahteraan, maka semakin tinggi pula jumlah zakat yang dikeluarkan/dibayarkan oleh pemegang saham.

1. Keputusan investasi

Keputusan investasi berkaitan dengan bagaimana manajer keuangan mengalokasikan modal untuk jenis investasi yang akan menghasilkan keuntungan di masa depan. Bentuk dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan mempertahankan tingkat keuntungan di masa depan.

2. Keputusan sponsor

Keputusan keuangan merupakan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana suatu usaha memperoleh modal atau capital. Inilah sebabnya mengapa keputusan pendanaan sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Dalam hal ini, manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber daya keuangan ekonomi perusahaan. Tujuannya agar perusahaan dapat membiayai investasi dan kebutuhan bisnisnya. dibandingkan dengan Keputusan

3. Bagi hasil atau dividen.

Bagi hasil atau dividen merupakan salah satu indikasi betapa sejahteranya investor ketika menginvestasikan uangnya pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, pembagian keuntungan dan dividen merupakan bagian dari harapan nyata para investor dan pemegang saham.

4.2.5 Konsep Manajemen Keuangan Syariah

Dasar Al-Qur'an untuk Konsep Manajemen Keuangan Syariah

Pembahasan manajemen keuangan syariah berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Furqon (25) ayat 67:

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa manajemen syariah suatu proses pengelolaan keuangan perusahaan secara efektif dan efisien dan menggunakan asset perusahaan tidak berlebihan. selain itu, perusahaan dalam mencari dana dan menggunakan dana dengan cara yang halal sesuai dengan syariat Islam dan menyimpan kelebihan harta untuk simpanan dana cadangan untuk menghadapi kesulitan di masa yang akan datang.

Prinsip pengelolaan keuangan syariah

Pengelolaan keuangan berbasis syariah harus menghormati prinsip-prinsip tersebut yaitu : (Muhammad Ayub. 2009):

1. Mengharap keridhaan sang pencipta
2. Tujuannya ingin dicapai harus sesuai dengan tuntunan sang pencipta dan peninggalan suci Rasulullah
3. Pembebasan bunga/riba.
4. Menerapkan nisbah antara bank dan nasabah.
5. Bidang yang disponsori bukanlah bidang yang dilarang oleh hukum Syariah.
6. Transaksi yang dilakukan harus halal

Yang tidak boleh dilakukan dalam pengelolaan keuangan syariah

Lalu apa saja yang yang tidak diperbolehkan dalam pengelolaannya?

1. Riba, menurut ayat 275-278 surat Al Baqarah menyatakan “Tinggalkan riba atau sistem bunga dan kembali ke sistem ekonomi islam.
2. Maisir mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa harus bekerja keras dan bermain-main. Hal ini diatur dalam surat Al Maidah ayat 90 tentang “menahan diri dari segala bentuk spekulasi dan perjudian”.
3. Gharar merupakan segala yang tidak jelas atau tidak pasti. Gharar juga bisa diartikan sebagai taruhan. Ini mencakup semua transaksi dimana barangnya tidak jelas atau belum ada di tangan. Misalnya penjualan ikan yang masih ditenakkan di dalam negeri dan belum terlihat hasilnya.
4. Pemborosan sebagaimana diatur dalam surat Al Isra ayat 26-27 tentang “menjauhkan diri dari segala bentuk yang berlebih-lebihan”.

Produk keuangan syariah

Jika tertarik dengan pengelolaan keuangan syariah, produk apa saja yang bisa dipilih?

Saat ini produk semakin beragam dan berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Berikut adalah beberapa produk yang mungkin tepat untuk kamu.

1. Asuransi Syariah

Asuransi syariah bisa menjadi pilihan jika manajemen asuransi konvensional kurang cocok untuk diambil. Asuransi ini bebas dari gharar, maisir dan riba serta memerlukan akad atau perjanjian tertulis, khususnya akad tabarru' dan/atau tijarah. Asuransi Syariah juga mempunyai misi aqidah, ibadah (ta'awun), ekonomi (iqtishad) dan pemberdayaan (sosial) masyarakat. Berbeda dengan asuransi tradisional yang hanya memiliki misi sosial.

2. Surat berharga syariah

Kamu juga bisa memilih produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang disebut juga sukuk. Sukuk merupakan surat berharga yang mewakili kepemilikan aset berupa surat utang berdasarkan prinsip syariah. Pada produk SBSN, bunga dikembalikan sebagai sewa atau bagi hasil dengan pembayaran secara tertentu tanpa dikenakan bunga atau riba.

3. Saham syariah

Indeks Saham Syariah diterbitkan oleh Pasar Modal Syariah. Dengan demikian, mekanisme perdagangan baik jual maupun beli tidak dilakukan secara langsung untuk menghindari manipulasi harga. Perbuatan tersebut juga tidak mencakup saham perbankan atau barang yang mengandung unsur haram, misalnya rokok dan minuman beralkohol.

4. Deposito syariah

Deposito syariah merupakan produk simpanan berjangka yang diatur berdasarkan hukum syariah Islam. kamu bisa mendapatkan nisbah sesuai akad yang ditentukan.

5. Pembiayaan syariah

Pembiayaan syariah (*leasing*) ada beberapa prinsip yang berbeda dalam pembiayaan konvensional. Dalam bentuk pembiayaan ini, transaksinya dilakukan dengan memberikan pinjaman sebagai penjual. Sedangkan pada keuangan konvensional, kedudukannya adalah kreditur. Artinya sebagai penjual, perusahaan wajib mempunyai barang untuk dijual terhadap konsumen. Lembaga keuangan harus membeli barang dari pemasok, baik secara tunai atau melalui transfer bank. Perusahaan kemudian akan menjual produknya kepada konsumen dengan harga lebih tinggi sesuai kesepakatan. Namun dalam transaksi tersebut harus disebutkan harga pembelian ditambah biaya perolehan dan keuntungan yang diperoleh perusahaan.

4.2.6 Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan upaya anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber daya organisasi lainnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dengan mentalitas sifat Rasulullah SAW yang terdiri dari siddiq, amanah, tabligh dan fathonah (Soemitra, Andri. 2010). Dengan demikian pengertian manajemen keuangan syariah adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dalam bidang mendapatkan dan menggunakan dana sesuai dengan syariat Islam. dengan demikian maka setiap kebijakan dan keputusan pada manajemen keuangan didasarkan pada aturan-aturan Al-Qur'an dan Hadits.

Pengertian manajemen syariah berbeda dengan manajemen konvensional berdasarkan pada pola pikir manusia untuk mencapai keuntungan dunia. Berikut ini dijelaskan perbedaan manajemen syariah dan konvensional (Soemitra, Andri. 2010).

Tabel 4.1. Perbedaan Manajemen Syariah dan Konvensional

No	Manajemen Syariah	Manajemen Konvensional
1	Berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits	Berdasarkan teori buatan manusia dan etika sekuler
2	Aktivitas dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala	Aktivitas dalam rangka bekerja untuk dunia
3	Mengikuti etika dan prinsip-prinsip Islam	Mengikuti aturan dan filosofi sekularisme dan kapitalisme
4	Mencapai tujuan organisasi melalui metode dan prosedur yang halal	Mencapai tujuan organisasi melalui cara apa pun yang sesuai keinginan dan ambisi
5	Untuk mencapai ketaatan kepada Allah	Untuk mencapai kepuasan pemilik dengan memaksimalkan laba
6	Berorientasi dan mencapai keselamatan akhirat	Berorientasi dan mencapai keuntungan duniawi
7	Menjaga keseimbangan antara dunia dan	Tidak Menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat

No	Manajemen Syariah	Manajemen Konvensional
	akhirat	
8	Keterampilan teknis (manajerial) dan Ibadah sangat penting.	Hanya Keterampilan teknis (manajerial) yang diperlukan

Analisis Aspek keuangan syariah adalah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan usaha dengan menjalankan dan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

Prinsip manajemen keuangan syariah meliputi berikut (Dadang Husen Sobana,2017).

1. **Segala** tindakan yang berkaitan dengan penggunaan uang harus dipertanggungjawabkan. Setiap upaya akuisisi aset harus memperhatikan metode yang sesuai dengan syariah, seperti investasi modal dan pinjaman usaha dengan kontrak yang sesuai dengan syariah Islam.
2. Kepemilikan yang kita miliki adalah hak orang lain. Harta yang terkumpul akan digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang/boleh seperti donasi, sponsorship, dan sedekah. digunakan untuk hal-hal wajib seperti zakat.
3. Uang hanyalah alat tukar, bukan barang dagangan atau produk yang dipertukarkan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, jika pelaku usaha menginvestasikan uang, mereka juga perlu memperhatikan prinsip bahwa "uang adalah alat tukar, bukan komoditas untuk jual beli".Perusahaan yang memiliki dana dapat berinvestasi pada kegiatan halal,

sedangkan perusahaan yang memiliki kelebihan dana yang belum terpakai dapat berinvestasi pada lembaga perantara seperti bank syariah dan reksa dana syariah.

4.2.7 Prinsip Keuangan Syariah

Prinsip manajemen keuangan syariah tidak terlepas dari etika bisnis. secara umum prinsip etika bisnis Islam dapat dilihat dari kesatuan ASIFAT yaitu: *Akidah* (ketaatan kepada Allah Ta'ala), *Siddiq* (benar), *Fathonah* (Cerdas), *Amanah* (terpercaya) dan *Tabligh* (Komunikatif) (Dadang Husen Sobana, 2017). Selain itu tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan syariah. Etika bisnis Islam melakukan praktik yang bertentangan dengan syariah Etika islam bertujuan agar setiap kegiatan manajemen keuangan yang dijalankan sesuai dengan syariah islam untuk keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Praktik sistem keuangan syariah telah dilakukan sejak kejayaan Islam. Akan tetapi, dikarenakan semakin melemahnya sistem kekhalifahan maka praktik sistem keuangan syariah tersebut digantikan oleh sistem perbankan barat. Sistem tersebut mendapat kritikan dari para ahli fiqh bahwa sistem tersebut menyalahi aturan syariah mengenai riba dan berujung pada keruntuhan kekhalifan Islam. Pada tahun 1970-an, konsep sistem keuangan syariah dimulai dengan pengembangan konsep ekonomi Islam. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah, prinsip sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut (Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015):

1. Larangan Riba

Riba didefinisikan sebagai “kelebihan” atas sesuatu yang dihasilkan dari penjualan atau pinjaman. Riba melanggar sistem keadilan sosial, kesetaraan dan hak milik. Sistem riba hanya menguntungkan pemberi pinjaman dengan mengenakan biaya atas keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman pada awal akad.

Sekalipun “keuntungan” dapat diketahui setelah jangka waktu tertentu, itu bukanlah hasil yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Pembagian Risiko

Risiko merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerjasama antar pemangku kepentingan. Risiko yang timbul dari aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh penerima modal tetapi juga oleh pemberi pinjaman. Pihak-pihak yang terlibat tersebut harus saling berbagi risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

3. Uang sebagai Modal Potensial

Dalam Islam, uang tidak diperbolehkan jika dianggap sebagai barang dagangan artinya dianggap mempunyai status yang sama dengan barang dagangan yang digunakan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan. Sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal yaitu uang yang efisien dan dapat menghasilkan barang atau jasa bersamaan dengan menggunakan sumber daya yang lain untuk mendapatkan keuntungan.

4. Larangan Spekulasi

Hal ini sejalan dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi, misalnya seperti permainan untung-untungan.

5. Kontrak/Perjanjian

Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang terlibat dapat mengurangi risiko asimetri informasi atau risiko moral hazard.

6. Operasional bisnis harus mematuhi hukum Syariah

Perdagangan yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut hukum syariah, seperti tidak membeli dan menjual minuman beralkohol atau memulai usaha peternakan babi. Oleh karena itu, prinsip

sistem keuangan syariah berdasarkan prinsip sebagai berikut (Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015) :

- a. Rela sama rela (*antaraddim minkum*).
- b. Tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*).
- c. Hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi al dhaman*).
- d. Untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bi al ghurmi*).

Dari prinsip sistem keuangan tersebut, maka muncul dan berkembang instrumen-instrumen keuangan syariah terkait dengan kegiatan investasi maupun jual-beli sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini membantu pelaku ekonomi dalam memahami berbagai produk keuangan syariah dan ketentuan-ketentuan syariah dari setiap produk keuangan tersebut.

4.2.8 Peranan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan mempunyai peranan yang penting dalam memperlancar arus dan dana karena bertindak sebagai perantara. Penanan manajer keuangan dalam memperlancar aliran kas atau dana tersebut. Secara umum keuangan perusahaan yang terdapat dalam neraca terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut (Muhamad, 2014):

1. Penggunaan Modal
penggunaan modal perusahaan dapat dibedakan antara Aktiva lancar dan aktiva tetap. Perbandingan atau pertimbangan antara kedua aktiva akan menentukan “struktur kekayaan”.
2. Sumber Modal
Sumber Modal dapat dibedakan antara modal sendiri dan utang jangka pendek dan panjang. Modal sendiri

terdiri dari pengambilan bagian peserta atau pemilik (modal, saham, modal peserta, dan lain-lain).

Dalam manajemen keuangan syariah terdapat tiga aktivitas yang harus berlandaskan syariah Islam. Ketiga aktivitas tersebut sebagai berikut.

1. Aktivitas perolehan dana

Setiap upaya-upaya dalam memperoleh aktiva perusahaan semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *syarf*, *wadiah*, *qardhal hasan*, *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*.

2. Aktiva pengelolaan aktiva

Dalam pengelolaan aktiva, perusahaan yang ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip uang sebagai alat tukar sebagai komoditas yang diperdagangkan. dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi Bank Syariah dan Reksadana Syariah.

3. Aktiva penggunaan dana

Aktiva perusahaan yang harus digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infak, wakaf, sedekah.

4.3 Kesimpulan

Pengelolaan keuangan syariah adalah suatu kegiatan usaha yang meliputi perencanaan, analisa dan pengendalian kegiatan keuangan yang berkaitan dengan bagaimana modal dikumpulkan, bagaimana modal digunakan dan bagaimana aset dikelola sesuai dengan tujuan dan tujuan perusahaan adalah mencapai tujuannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip Syariah.

1. Ruang lingkup pengelolaan keuangan syariah, yaitu.
 - a. Perbankan dan lembaga keuangan: Bank Umum Syariah dan Bank Keuangan Rakyat Syariah
 - b. Lembaga keuangan non bank: Pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan (lembaga leasing, perusahaan anjak piutang, perusahaan kartu plastik, pembiayaan konsumen, pegadaian), lembaga keuangan mikro syariah (lembaga pengelola zakat, lembaga pengelola wakaf, BMT)
2. Pembiayaan konsumen, pegadaian), lembaga keuangan mikro syariah (lembaga pengelola zakat, lembaga pengelola wakaf, BMT)
3. Landasan hukum pengelolaan keuangan syariah dapat digolongkan menjadi dua landasan hukum, yaitu landasan hukum berdasarkan undang-undang dan landasan hukum berdasarkan filsafat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2014)
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia
- Arkanleema
- Djakman D Chaerul. 1999. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Manulang, M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Yusanto, M. I. dan M.K. Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta:Gema Insani Press
- Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017)
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014),
- 15 Didin Hafidhudin dan Henri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insai Press, 2003),
- Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah*, (Yogyakarta: Delokomotif, 2010)

BAB 5

EKONOMI SYARIAH DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Alamsyah Agit

5.1 Pentingnya Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi

Ekonomi syariah merupakan bentuk sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip dan nilai yang sesuai dengan syariat islam. Dalam sistem ekonomi syariah, tidak jauh berbeda dengan sistem ekonomi pada umumnya, yang mencakup diantaranya aspek ekonomi, keuangan dan bisnis, yang mana semua aspek ini diatur dan dioperasikan sesuai dengan hukum dan syariat Islam. Dalam prakteknya, ekonomi syariah menerapkan beberapa prinsip-prinsip yang melibat banyak aspek, seperti aspek moral, etika, dan keadilan. Adapun beberapa prinsip utama dalam ekonomi syariah meliputi, riba (bunga), zakat, mudarabah dan musharakah, transparansi dan keadilan, larangan akan aktivitas haram, kepatuhan syariah, dan kesejahteraan sosial.

5.1.1 Kontribusi dan Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan

Sebagai sebuah sistem ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan hukum dan syariat islam, ekonomi syariah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, yang diantaranya adalah sebagai berikut (Fitria, 2016) :

1. Pertama, ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi dalam bentuk suntikan modal, pembiayaan proyek pembangunan, tabungan dan setoran haji, serta pendirian asuransi dan bank BUMN syariah.
2. Kedua, ekonomi syariah juga berperan dalam pengembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah. Meskipun perkembangannya masih terbatas, namun lembaga-lembaga ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan berpotensi untuk terus berkembang.
3. Ketiga, ekonomi syariah juga berperan dalam pendidikan dan sosialisasi masyarakat tentang ekonomi syariah. Meskipun saat ini masih minim, namun peran ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah.
4. Keempat, ekonomi syariah juga berperan dalam pengembangan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Meskipun saat ini masih jauh tertinggal, namun peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa ekonomi syariah dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Kelima, ekonomi syariah juga berperan dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh ekonomi Islam. Dengan adanya ekonomi syariah, berbagai permasalahan dan tantangan ini dapat dihadapi dan diatasi dengan lebih baik.

Dalam hal kontribusi, Ekonomi syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui beberapa cara, yakni sebagai berikut (Arfah and Siregar, 2021) :

1. Pertama, karena ekonomi syariah melarang bunga bank dan spekulasi, dana yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah harus disalurkan ke sektor riil, sehingga ekonomi

syariah memainkan peran penting dalam pertumbuhan sektor riil.

2. Kedua, disebabkan oleh industri keuangan syariah, ekonomi syariah telah menarik investasi asing ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur Tengah. Berbagai peluang investasi syariah telah menarik investor dari negara-negara petro-dollar ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
3. Ketiga, perilaku ekonomi yang etis ditanamkan di masyarakat Indonesia melalui gerakan ekonomi syariah. Ekonomi syariah mengutamakan kebenaran dan keadilan dan menentang perilaku ekonomi yang tidak baik seperti riba, spekulasi, dan ketidakpastian (gharar).
4. Keempat, perbankan syariah telah melaksanakan fungsi intermediasi mereka dengan membantu mengalihkan dana dari bisnis yang memiliki kelebihan dana ke bisnis yang kekurangan dana.

Salah satu pilihan kebijakan yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor riil di Indonesia adalah pengembangan perbankan syariah dan industri keuangan. Menyediakan kebijakan dan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah dalam jangka panjang sangat penting untuk kemajuan masyarakat.

5.1.2 Dampak Positif Ekonomi Syariah

Pembangunan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh ekonomi syariah. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS), Perbankan Syariah, Zakat, dan infak dan sedekah adalah beberapa lembaga keuangan dan perbankan yang memanfaatkannya, yang membantu pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan ekonomi syariah sebagai dasar kekuatan dan ketahanan. Selain itu, ekonomi

Islam berusaha untuk mengimbangi keinginan pribadi dan masyarakat. Bagi seorang muslim, keuntungan material yang diperoleh dari kegiatan ekonomi digunakan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita insani, yaitu kepatuhan kepada Allah SWT (Handayani and Wening, 2021).

Perbankan syariah juga menjadi instrumen penting dalam sirkulasi aktivitas perekonomian. Keberadaan bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan telah menjadi bagian penting aktifitas perekonomian masyarakat Islam sehari-hari. Dengan demikian, ekonomi syariah membawa dampak positif dalam pembangunan ekonomi nasional melalui berbagai lembaga dan instrumen keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

5.2 Tantangan dan Hambatan Implementasi Ekonomi Syariah

Sebagai sebuah sistem ekonomi, ekonomi syariah menghadapi beberapa tantangan dalam konteks pembangunan ekonomi. Tantangan ini menuntut adanya upaya untuk menunjang pengintegrasian ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi, tantangan ini diantaranya adalah sebagai berikut (Iswanto, 2020):

1. Pertama, meskipun bank syariah telah terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi, sistem bagi hasil yang menjadi prinsip utama ekonomi syariah masih kurang diterima di negara yang didominasi oleh sistem perbankan konvensional.
2. Kedua, tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif, menjaga stabilitas harga, mengukur dan mengendalikan inflasi, membuka kesempatan kerja, dan mendukung usaha-usaha sektor riil yang merupakan basis perputaran ekonomi.

3. Ketiga, tantangan lainnya adalah bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah. Meskipun telah ada upaya untuk memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah, namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami konsep dan manfaat ekonomi syariah.
4. Keempat, tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan bahwa ekonomi syariah dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi materiil maupun spiritual.
5. Kelima, tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan bahwa ekonomi syariah dapat berkontribusi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk yang terus meningkat.

Dalam hal hambatan-hambatan, terdapat beberapa hambatan yang dialami ekonomi syariah dalam implementasinya, terutama dalam konteks pembangunan, hal ini menjadi cerminan, dimana point terpenting yang urgen untuk diatasi dalam menunjang implementasi dan penerapan ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi (Arif, 2019):

1. Pertama, kebutuhan akan sumber daya manusia berkualitas meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan industri keuangan dan perbankan syariah, tetapi masih sedikit sumber daya manusia yang memahami sistem ekonomi syariah.
2. Kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem keuangan dan bisnis syariah. Ini terlihat dari fakta bahwa lebih sedikit masyarakat yang memiliki akses ke perbankan syariah daripada perbankan konvensional.
3. Ketiga, adanya isu arus investasi modal dari luar negeri yang dapat menyebabkan masalah kedaulatan negara.

4. Keempat, ada beberapa orang yang khawatir bahwa Perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dapat membahayakan karena dapat diambil oleh pesaing dari negara lain pasar domestik yang potensial.
5. Kelima, infrastruktur yang perlu diperbaiki dan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha kecil, menengah, dan besar.
6. Keenam, perkiraan komposisi angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan hanya SD lebih banyak dibandingkan dengan pendidikan di atasnya, yaitu SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi, menunjukkan kualitas angkatan kerja yang rendah.
7. Ketujuh, agar pengembangan lebih efisien dan efektif, langkah-langkah dari praktisi, akademisi, dan asosiasi harus bekerja sama.

5.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi syariah adalah investasi di sektor riil. Jika investasi di sektor ini berkurang, perlambatan di sektor riil akan terjadi, yang berdampak pada penurunan ketersediaan barang dan jasa di pasar, yang dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan penurunan lapangan kerja. Dengan demikian, investasi di sektor riil sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi syariah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi syariah juga dipengaruhi oleh distribusi harta dan kekayaan yang adil dan merata. Jika distribusi ini tidak adil dan merata, akan terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti peningkatan pengangguran, tingkat kejahatan, kualitas pendidikan yang lebih rendah, dan penurunan kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang (Aprianto, 2016).

Pertumbuhan ekonomi syariah sangat bergantung pada pembangunan ekonomi. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pembangunan ini tidak hanya memperhatikan aspek material, tetapi juga spiritual dan moral. Akibatnya, pembangunan moral dan spiritual harus diintegrasikan dengan pembangunan ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi syariah, peran pemerintah dan masyarakat juga sangat penting. Kebijakan distribusi yang adil dan merata hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi syariah sangat dibantu oleh sistem ekonomi Islam. Sistem ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi melalui penerapan kebijakan yang menguntungkan dan mewujudkan keadilan ekonomi umat.

Pertumbuhan ekonomi islam dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang diantaranya adalah sebagai berikut (Zainuddin, 2017):

1. Penyediaan sumber daya manusia, sumber daya alam, stok modal, kewirausahaan, dan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sumber daya ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Demand. Jika penawaran lebih besar daripada permintaan, investasi akan menurun, yang mengurangi dampak komponen pertumbuhan lainnya.
3. Persediaan barang yang terus meningkat menunjukkan bahwa produksi produk harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.
4. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien merupakan faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan dalam menyediakan berbagai macam barang kepada penduduknya.
5. Teknologi dapat mempercepat proses manufaktur dan distribusi barang dan jasa.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Islam harus berbasis pada keadilan distribusi. Dalam Islam, tujuan pertumbuhan ekonomi adalah agar setiap anggota masyarakat, tidak peduli ras, agama, atau karakternya, memiliki kesempatan untuk mendapatkan kecukupan, bukan kekurangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dapat menyebabkan ketidakmerataan ekonomi di negara-negara Islam. Selain itu, pertumbuhan ekonomi harus diorientasikan pada peningkatan produksi, tetapi dengan dasar keadilan distribusi. Memberi kebaikan kepada setiap orang dalam situasi apapun adalah cara untuk mencapai keadilan.

5.2.2 Tantangan dalam Ekonomi Syariah

Beberapa faktor menyebabkan pelaksanaan ekonomi syariah menjadi sulit. Pertama, prinsip ekonomi syariah, sistem bagi hasil, masih kurang diterima di negara-negara yang didominasi oleh sistem perbankan konvensional. Kedua, kebijakan dan regulasi yang tepat, pemahaman yang baik tentang ekonomi syariah, diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, menjaga stabilitas harga, mengukur dan mengendalikan inflasi, dan mendukung usaha sektor riil. Ketiga, masih ada perbedaan antara penerapan konsep dengan bagaimana karyawan melihat konsep ekonomi Islam dan bagaimana mereka melihatnya. Keempat, untuk memastikan bahwa ekonomi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik materiil maupun spiritual, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam praktik. Kelima, untuk memastikan bahwa ekonomi syariah dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan untuk mencapai (Iswanto, 2020).

Adapun tantangan yang umumnya dihadapi dalam konteks ekonomi islam, adalah sebagai berikut (Maharani and Ulum, 2019):

1. Menarik orang-orang di masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi syariah, seperti wirausaha syariah dan perbankan syariah.
2. Wirausaha Syariah dan perbankan Syariah harus dapat membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan sebanding dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan. Sehingga pelanggan Muslim tidak merasa dibohongi atau kecewa, kualitas barang sangat penting.
3. Pembeli dan konsumen tidak dapat melihat dan mengetahui bentuk fisik produk dalam sistem ekonomi digital.
4. Teknologi ekonomi digital belum dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
5. Pelaku ekonomi syariah harus dapat memahami evolusi ekonomi digital, yang membawa tantangan dan peluang baru.
6. Kejujuran dan kepercayaan antara penjual dan pembeli adalah kunci transaksi ekonomi secara online maupun konvensional. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan dan mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang baik.

5.2.3 Kendala Sosial dan Budaya dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi, dan distribusi, tetapi juga sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, dan ketauhidan. Oleh karena itu, kendala sosial dan budaya yang umumnya ditemui dalam ekonomi Syariah meliputi (Amiruddin K, 2017):

1. Persoalan Moral: Ekonomi Syariah menekankan pentingnya etika dan moral dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, perilaku tidak etis seperti penipuan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat menjadi kendala dalam implementasi ekonomi Syariah.
2. Ketidakadilan: Ekonomi Syariah berusaha untuk mencegah ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Namun, ketidakadilan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat dapat menjadi kendala dalam mencapai tujuan ini.
3. Ketauhidan: Ekonomi Syariah berdasarkan prinsip ketauhidan, yang berarti bahwa semua aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ajaran Islam. Namun, budaya dan tradisi lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam dapat menjadi kendala dalam implementasi ekonomi Syariah.
4. Pemahaman dan Penerimaan Masyarakat: Ekonomi Syariah membutuhkan pemahaman dan penerimaan yang luas dari masyarakat. Namun, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip dan praktik ekonomi Syariah dapat menjadi kendala dalam implementasinya.
5. Kepemilikan Pribadi: Meskipun Islam mengakui kepemilikan pribadi, namun dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Hal ini dapat menjadi kendala jika ada resistensi dari individu atau kelompok yang merasa hak kepemilikannya terancam.
6. Kerjasama: Ekonomi syariah menekankan pentingnya kerjasama dalam aktivitas ekonomi, namun, adanya budaya kompetisi terkadang menghambat adanya kerjasama, dan terus menciptakan persaingan sesama pelaku ekonomi.

5.3 Peningkatan Efektivitas Ekonomi Syariah dalam Pembangunan

Pembangunan ekonomi Islam sangat penting karena berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Prinsip-prinsip ini mengatur konsumsi dalam ekonomi Islam dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Selain itu, pemberdayaan masyarakat adalah fokus pembangunan ekonomi dalam ekonomi Islam. Dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek dan obyek pembangunan, program ini dapat mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk menerapkan pembangunan. Diharapkan bahwa masyarakat yang berdaya dapat mengatasi kemiskinan secara mandiri. Dalam konteks ekonomi Islam, pembangunan ekonomi juga menekankan pentingnya konsumsi yang rasional. Larangan hidup mewah dan pelelangan Israf, Tabdzir, dan Safih adalah beberapa aturan yang dapat digunakan untuk mendukung rasionalitas ini. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mencegah pembagian kekayaan yang tidak proporsional, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan kemakmuran masyarakat (Hamid, 2018).

Dalam konteks ekonomi Islam, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ekonomi adalah (Ghufron, 2015):

1. Pemberdayaan Ekonomi: Prinsip pemberdayaan ekonomi Islam mencakup kemakmuran, keadilan, pemerataan, kesejahteraan, keamanan, dan kemaslahatan umum.
2. Keadilan dan Pemerataan: Sistem ekonomi Islam menjamin bahwa masyarakat memiliki kekayaan dan menentang akumulasi kekayaan oleh kelompok tertentu.

3. Keseimbangan: Dalam ekonomi Islam, ekonomi berada di tengah-tengah dunia dan seimbang secara adil. Ini berlaku untuk semua aspek ekonomi, termasuk modal dan usaha, produksi dan konsumsi, produsen, perantara, dan konsumen, dan antara kelompok masyarakat yang berbeda.
4. Keseimbangan antara Kebutuhan Materi dan Etika: Ekonomi Islam telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mengimbangi kebutuhan materi dan kebutuhan etika manusia.
5. Penggunaan Modal: Sistem ekonomi Islam membahas modal secara lebih mendalam, baik tentang cara memperolehnya maupun cara mengembangkan dan memanfaatkannya. Modal tidak boleh disalahgunakan.
6. Keadilan dan Persamaan Prinsip Produksi: Islam memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan setiap orang tanpa menghalangi orang lain atau menghancurkan masyarakat.
7. Pertimbangan Kesejahteraan Umum: Prinsip kesejahteraan ekonomi adalah prinsip utama yang harus diperhatikan selama proses produksi. Prinsip ini terletak pada pertimbangan kesejahteraan umum yang lebih luas yang mencakup masalah moral, pendidikan, dan agama.

5.3.1 Perbaikan Aspek Ekonomi Syariah

Dalam Ekonomi Islam, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perbaikan atau peningkatan pendapatan nasional, yakni sebagai berikut (Apriliana, 2020) :

1. Pertama, pelajari bagaimana pendapatan per rumah tangga tersebar. Akan mudah bagi negara untuk mengetahui berapa banyak orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan memahami pendapatan individu secara nasional.

2. Kedua, mendapatkan pemahaman tentang ukuran kesejahteraan ekonomi Islam. Kemampuan negara untuk menyediakan kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi, dan pelayanan publik lainnya, dapat dihitung dengan indikator ini.
3. Ketiga, memahami bagaimana zakat, infaq, dan sedekah berbeda dengan santunan saudara. Zakat, infaq, dan sedekah sangat penting bagi orang Muslim dan merupakan bagian dari kepatuhan dalam menjalankan kehidupan beragama. Dalam ekonomi Islam, adalah wajib untuk membantu saudara atau kerabat yang mengalami kesulitan keuangan.
4. Keempat, penggunaan waqaf linked sukuk meningkat. Untuk meningkatkan pendapatan nasional, Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mendorong berbagai infrastruktur berbasis wakaf.

Salah satu cara untuk mendukung peningkatan aspek ekonomi syariah adalah dengan melakukan investasi. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat melakukan investasi. Pertama dan terpenting, investasi harus menghasilkan keuntungan finansial yang kompetitif dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Kedua, investasi harus terbebas dari bisnis dan praktik yang haram. Ketiga, investasi harus selalu mempertimbangkan aspek kehalalannya. Keempat, investasi harus dilakukan dengan tujuan mengembangkan harta kekayaan daripada menumpuknya. Selain itu, peningkatan elemen ekonomi syariah juga dapat dibantu oleh manajemen investasi. Untuk mencapai tujuan investasi yang menguntungkan investor, manajemen investasi adalah pekerjaan profesional yang mengelola berbagai sekuritas atau surat berharga, seperti

saham, obligasi, dan aset lainnya, seperti properti. Kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi dapat membantu meningkatkan aspek ekonomi syariah selain investasi dan manajemen investasi. Ini ditunjukkan oleh kerjasama perekonomian antar negara seperti *ASEAN Economic Community* (AEC), yang memudahkan perdagangan barang, jasa, investasi, dan modal antar negara ASEAN (Hidayati, 2017).

5.3.2 Pengembangan Lembaga Ekonomi Syariah

Untuk beberapa alasan, pengembangan lembaga ekonomi syariah sangat penting. Pertama, ini menunjukkan nilai-nilai Islam tentang masalah ekonomi dalam kehidupan manusia. Kedua, pengembangan lembaga ekonomi syariah, seperti pasar tradisional, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena sistem ekonomi Islam berfokus pada "rahmatan lil alamin", yang berarti keadilan dan kesejahteraan untuk semua orang. Misalnya, dari sudut pandang ekonomi Islam, pasar Cekkeng konvensional dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Pasar Cekkeng menawarkan pedagang kecil peluang untuk berbisnis dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, keberadaan pasar ini telah menarik pengunjung ke pasar sentral, menunjukkan peran pentingnya dalam ekonomi lokal. Upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menjual kebutuhan sehari-hari, bahan makanan, pakaian, dan barang lainnya di pasar Cekkeng. Akibatnya, membangun lembaga ekonomi syariah sangat penting untuk meningkatkan kondisi ekonomi, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Untuk meningkatkan pencapaian ini, potensi yang ada harus digali lebih jauh (Wahdania and HR, 2020).

Ada banyak cara untuk mengembangkan lembaga ekonomi syariah. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan

zakat. Zakat dapat berupa modal yang dapat digunakan untuk membangun proyek sosial atau untuk meningkatkan modal pengusaha atau pedagang kecil. Selain itu, pemerintah Islam diizinkan untuk membangun perusahaan atau pabrik dengan uang zakat untuk memiliki dan menghasilkan keuntungan bagi kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap saat. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa dana zakat akan lebih efektif digunakan untuk kegiatan produktif jika dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan sejenisnya, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga non-profit yang mengelola zakat, infaq, dan sadaqah dan sepenuhnya berfokus pada nilai dasar ibadah dalam meningkatkan martabat kaum miskin menjadi individu yang mandiri dan bertaqwa kepada Allah. Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa zakat, infaq, dan shadaq produktif memengaruhi perkembangan bisnis mikro (Shobah and Rifai, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin K. 2017. 'Konseptualisasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah', *AL-MASHRAFIYAH, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 1(1), pp. 8–13.
- Aprianto, N.E.K. 2016. 'Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam', *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), pp. 73–96.
- Apriliana, E.S. 2020. 'Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Ekonomi Islam', *AL-IQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), pp. 19–28. Available at: <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3123>.
- Arfah, T. and Siregar, F.A. 2021. 'Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional', *EKS YA - Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), pp. 30–38.
- Arif, Z. 2019. 'Optimalisasi Peluang Dan Tantangan Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), pp. 83–93. Available at: <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1817>.
- Fitria, T.N. 2016. 'Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(3), pp. 29–40.
- Ghufron, M.I. 2015. 'Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat', *DINAR*, 1(2), pp. 39–76.
- Hamid, A. 2018. 'Teori Konsumsi Islam Dalam Peningkatan Ekonomi Umat', *j-EBIS*, 3(2), pp. 204–216.

- Handayani, R.E. and Wening, P.P.S. 2021. 'Perspektif Dan Kontribusi Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional', *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 2(2), pp. 58–73.
- Hidayati, A.N. 2017. Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam', *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), pp. 227–242.
- Iswanto, B. 2020. 'Tantangan Ekonomi Syariah Zaman Modern', *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)* , 2(1), pp. 16–29.
- Maharani, S. and Ulum, M. 2019. 'Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia', in *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, pp. 1–11.
- Shobah, A.N. and Rifai, F.Y.A. 2020. 'Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), p. 521. Available at: <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>.
- Wahdania, H. and HR, A.S. 2020. 'Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurutperspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Cekkeng Di Kab. Bulukumba)', *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), pp. 44–60.
- Zainuddin, M. 2017. 'Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam', *Istithmar*, 1(2), pp. 121–130.

BAB 6

EKONOMI SYARIAH: MEMBANGUN KEBERLANJUTAN FINANSIAL DI ERA GLOBAL

Oleh Agung Nusantara

6.1 Pendahuluan

Di era global tantangan dalam mengembangkan sistem finansial yang berkelanjutan dan inklusif semakin besar. Memenuhi kebutuhan ekonomi dan masyarakat di tengah dinamika global yang cepat menjadi agenda krusial. Demikian pula dengan sistem perekonomian yang berbasis pada syariah.

Indonesia, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, menjadi sorotan utama terkait kebijakan pemerintah tentang wajib halal (Dinar Standard, 2020). Lembaga Instituo halal tersebut menyoroti dampak kebijakan halal Indonesia, khususnya di bidang makanan dan obat-obatan. Kebijakan tersebut diduga akan membawa dampak besar bagi perekonomian, bukan hanya perekonomian Indonesia namun juga perekonomian dunia. Keterkaitan antar ekonomi dunia, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Sami Al-Suwailem (Al-Suwailem, 2022), menjelaskan bahwa ekonomi dunia terbukti sistem yang saling terkait dan kompleks. Sehingga, dorongan ekonomi suatu negara akan memiliki dampak terhadap perekonomian dunia.

Kompleksitas hubungan perekonomian tersebut akan membawa konsekuensi kebutuhan akan sistem

keuangan yang relevan. Di sinilah peran keuangan syariah menjadi penting, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif sebagaimana yang direncanakan oleh ADB (ADBInstitute, 2023).

Di tengah konteks ini, ekonomi syariah telah muncul sebagai model yang menawarkan prinsip-prinsip yang kuat untuk membangun keberlanjutan finansial yang sejalan dengan perkembangan global.

Seiring dengan peningkatan interkoneksi global dan transformasi ekonomi, pilar-pilar keberlanjutan seperti tanggung jawab sosial perusahaan, manajemen risiko yang cermat, dan keseimbangan antar-generasi semakin penting. Ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, keberlanjutan sosial, dan etika bisnis, muncul sebagai model alternatif yang berpotensi mengatasi tantangan tersebut.

Artikel ini mengangkat tema "Ekonomi Syariah: Membangun Keberlanjutan Finansial dalam Era global". Artikel ini akan membahas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh ekonomi syariah dalam merespons dinamika global, serta menguraikan bagaimana prinsip-prinsipnya dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek ekonomi.

Melalui pemahaman mendalam tentang konsep dan penerapan ekonomi syariah, artikel ini bertujuan untuk membuka pandangan yang lebih luas tentang bagaimana ekonomi syariah dapat berperan dalam mewujudkan keberlanjutan finansial yang holistik dan adaptif di era global. Dengan menepi masa depan yang penuh peluang, artikel ini berharap dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca dalam menghadapi tantangan dan menjawab panggilan keberlanjutan finansial di dunia yang semakin terhubung ini.

6.2 Kontribusi Kelembagaan Keuangan Syariah

Kelembagaan keuangan merupakan salah satu bentuk ekonomi syariah. Kualitas kelembagaan keuangan yang baik, akan mampu mendorong perbaikan tingkat kemiskinan dalam perekonomian (Beck, Demirguc-Kunt and Levine, 2004). Demikian pula hasil temuan World Bank (World Bank, 2007), menyatakan bahwa perkembangan keuangan yang baik memiliki kemampuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Dr. Sami Al-Suwaeli, pasar persaingan tidak memiliki kemampuan untuk adil. Kata kunci mekanisme pasar yang sering disebutkan dalam ilmu ekonomi adalah persaingan (*competition*). Dalam mekanisme pasar, keinginan untuk mendominasi selalu ada dan berkesempatan untuk muncul. Sehingga hasil akhir dari mekanisme pasar dimungkinkan untuk memiliki bentuk non-competition (Al-Suwaillem and Doria, 2019). Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme alternatif yang memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan keterbatasan yang ada. Dan peluang tersebut ada pada sistem keuangan Syariah (Iqbal, 2017, pp. 203–204).

Kelembagaan keuangan syariah memiliki kontribusi yang penting terhadap kelembagaan perekonomian dalam beberapa aspek. Kelembagaan keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang riba dan mempromosikan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Berikut adalah beberapa cara di mana kelembagaan keuangan syariah dapat berkontribusi terhadap kelembagaan perekonomian:

1. Pemberian Layanan Keuangan Inklusif: Kelembagaan keuangan syariah mendorong inklusivitas finansial dengan menyediakan akses ke layanan keuangan bagi segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani

oleh sistem keuangan konvensional. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan partisipasi ekonomi dari berbagai lapisan masyarakat.

2. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Kelembagaan keuangan syariah memiliki fokus pada prinsip berbagi risiko dan partisipasi dalam keuntungan. Ini memungkinkan UKM untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih mudah dan lebih adil, serta membantu pertumbuhan sektor UKM yang memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
3. Penghindaran Spekulasi Berlebihan: Prinsip-prinsip keuangan syariah melarang transaksi yang bersifat spekulatif dan merugikan. Ini dapat membantu mencegah aktivitas spekulatif berlebihan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan krisis keuangan.
4. Pemberdayaan Masyarakat: Kelembagaan keuangan syariah lebih mementingkan pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan produktif yang berkelanjutan. Pembiayaan yang berfokus pada proyek-proyek yang memiliki dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan dapat membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
5. Promosi Etika dan Tanggung Jawab Sosial: Prinsip-prinsip keuangan syariah mempromosikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Investasi dalam sektor yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam dapat membantu mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
6. Pengembangan Infrastruktur dan Proyek Strategis: Kelembagaan keuangan syariah dapat berkontribusi pada pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan proyek strategis dalam ekonomi. Hal ini dapat membantu

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

7. Pengembangan Pasar Keuangan Alternatif: Kelembagaan keuangan syariah juga mendorong pengembangan pasar keuangan alternatif yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada instrumen keuangan konvensional dan mengembangkan opsi yang lebih beragam.

6.3 Teknologi dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Syariah

Teknologi dan pengembangan kelembagaan ekonomi syariah memiliki relevansi dan arti penting yang signifikan dalam konteks perkembangan ekonomi global saat ini. Teknologi telah memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan dan aksesibilitas layanan keuangan syariah, serta memajukan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa aspek relevansi dan arti pentingnya:

1. Aksesibilitas dan Inklusivitas: Teknologi memungkinkan kelembagaan ekonomi syariah untuk menyediakan layanan keuangan kepada lebih banyak orang, termasuk yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan tradisional. Layanan perbankan digital, aplikasi finansial, dan teknologi pembayaran memungkinkan akses ke produk keuangan syariah dengan lebih mudah.
2. Pengembangan Produk Inovatif: Teknologi memungkinkan pengembangan produk keuangan syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masa kini. Contohnya, teknologi blockchain dapat digunakan dalam pembiayaan berbasis akad mudharabah atau musyarakah.

3. Peningkatan Transparansi: Teknologi dapat memberikan tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam transaksi keuangan syariah. Teknologi seperti blockchain dapat membantu memastikan integritas transaksi dan akuntabilitas yang diperlukan dalam prinsip-prinsip keuangan syariah.
4. Peningkatan Efisiensi Operasional: Teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah, mengurangi biaya administratif, dan mempercepat proses-proses seperti persetujuan pembiayaan atau transfer dana.
5. Literasi Keuangan: Teknologi dapat dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat. Aplikasi mobile atau platform e-learning dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan manfaat dari produk keuangan syariah.
6. Pengembangan Ekosistem Keuangan Syariah: Teknologi dapat membantu mengembangkan ekosistem yang mendukung kelembagaan ekonomi syariah, termasuk pasar modal syariah, asuransi syariah, dan investasi berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
7. Pertumbuhan Global: Dalam era global dan konektivitas, teknologi dapat membantu ekonomi syariah untuk tumbuh dan menjangkau pasar internasional dengan lebih mudah.
8. Pemenuhan Prinsip Keuangan Syariah: Teknologi dapat membantu memastikan pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti menghindari transaksi yang meragukan atau mengamankan privasi dan keamanan data yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam keseluruhan, penggunaan teknologi dalam pengembangan kelembagaan ekonomi syariah memiliki arti

penting dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam ekonomi global yang terus berubah. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan teknologi juga harus selaras dengan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip keuangan syariah agar tetap konsisten dengan tujuan akhirnya

6.4 Tantangan dan Peluang untuk Pengembangan Ekonomi Syariah di Masa Depan

Pengembangan ekonomi syariah di masa depan akan dihadapkan pada sejumlah tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa tantangan dan peluang utama:

Tantangan:

1. Kesadaran dan Pendidikan: Tantangan utama adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pendidikan dan literasi keuangan syariah akan menjadi kunci untuk mengatasi kesalahpahaman dan membangun dukungan dari masyarakat.
2. Kesesuaian Regulasi: Dalam banyak negara, regulasi keuangan mungkin belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi syariah. Penting untuk memiliki kerangka kerja regulasi yang jelas dan mendukung untuk memfasilitasi produk dan layanan keuangan syariah.
3. Infrastruktur Teknologi: Sementara teknologi dapat menjadi peluang besar, infrastruktur teknologi yang kuat dan aman akan menjadi prasyarat. Tantangan seperti perlindungan data dan keamanan siber harus ditangani dengan serius.

4. Ketersediaan Tenaga Ahli: Pengembangan ekonomi syariah membutuhkan tenaga ahli yang kompeten dalam keuangan syariah, hukum Islam, dan aspek lainnya. Ketersediaan tenaga ahli yang memadai akan menjadi kunci untuk memajukan sektor ini.
5. Keharmonisan dengan Perubahan Sosial: Pengembangan ekonomi syariah juga harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip agama.

Peluang:

Pasar yang Berkembang: Potensi pasar ekonomi syariah masih besar, baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas produk dan layanan keuangan syariah.

1. Teknologi dan Digitalisasi: Teknologi dan digitalisasi membuka peluang baru untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dan efisien, serta meningkatkan aksesibilitasnya.
2. Investasi Berkelanjutan: Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berfokus pada keadilan sosial dan keberlanjutan memiliki sinergi dengan konsep investasi berkelanjutan (sustainable investment). Ini dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan produk investasi yang ramah lingkungan dan sosial.
3. Pengembangan Pasar Modal Syariah: Pasar modal syariah memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang, terutama dalam hal sukuk (obligasi syariah) dan investasi saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Kemitraan dan Kolaborasi: Peluang kerjasama antara lembaga keuangan konvensional dan keuangan syariah

- dapat memperluas jangkauan layanan keuangan syariah dan memajukan pertumbuhannya.
5. Pengembangan Industri Halal: Konsep ekonomi syariah berjalan sejalan dengan industri halal, yang mencakup makanan, minuman, farmasi, dan lainnya. Pengembangan industri halal dapat menjadi motor pertumbuhan bagi ekonomi syariah.
 6. Keseluruhan, menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang ini akan memerlukan kerja keras, inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen untuk memajukan ekonomi syariah sebagai alternatif yang berkelanjutan dan inklusif dalam konteks ekonomi global
 7. Kemampuan ekonomi syariah dalam membangun keberlanjutan finansial dalam era global memiliki relevansi yang signifikan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berfokus pada keadilan, keberlanjutan sosial, dan etika bisnis sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam konteks global. Berikut adalah beberapa cara di mana ekonomi syariah dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan finansial:
 8. Investasi Berkelanjutan (Sustainable Investment): Ekonomi syariah memiliki perspektif yang sejalan dengan investasi berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah mempromosikan investasi dalam sektor-sektor yang mematuhi nilai-nilai sosial dan lingkungan. Ini termasuk mendukung bisnis yang berfokus pada energi terbarukan, manajemen limbah, dan praktik ramah lingkungan lainnya.
 9. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Ekonomi syariah mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui konsep-konsep seperti wakaf, zakat, dan usaha mikro dan kecil. Dengan mendukung usaha kecil dan menengah serta sektor informal, ekonomi syariah dapat

membantu menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

10. Manajemen Risiko Berkelanjutan: Prinsip keuangan syariah yang melarang riba (bunga) dan transaksi spekulatif mempromosikan manajemen risiko yang lebih hati-hati. Ini dapat membantu mencegah ketidakstabilan ekonomi dan krisis finansial yang berdampak pada keberlanjutan.
11. Pembiayaan Infrastruktur dan Proyek Berkelanjutan: Ekonomi syariah memiliki potensi dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur dan proyek berkelanjutan lainnya yang mendukung perkembangan ekonomi dan sosial.
12. Pengembangan Pasar Modal Berkelanjutan: Pasar modal syariah dapat menjadi wadah untuk pengembangan instrumen investasi berkelanjutan, seperti sukuk hijau atau sosial.
13. Keseimbangan Antar-generasi: Prinsip ekonomi syariah mendukung prinsip keadilan antar-generasi. Dalam konteks keberlanjutan finansial, ini berarti menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan masa depan.
14. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial: Ekonomi syariah mempromosikan etika bisnis yang kuat dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Namun, untuk benar-benar membangun keberlanjutan finansial, ekonomi syariah perlu terus beradaptasi dengan dinamika globalisasi dan memastikan bahwa prinsip-prinsipnya diterapkan secara konsisten. Hal ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, pengembangan regulasi yang sesuai, serta

inovasi dalam produk dan layanan yang relevan dengan tuntutan pasar global

6.5 Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari bahasan tentang peran ekonomi Syariah dalam menjaga keberlanjutan finansial di era global:

1. Konsep Keberlanjutan: Ekonomi Syariah memiliki dasar-dasar yang kuat dalam konsep keberlanjutan. Prinsip-prinsipnya, seperti larangan riba (riba) dan investasi dalam bisnis yang sesuai dengan etika Islam, dapat mendukung pembangunan keberlanjutan finansial jangka panjang.
2. Pengembangan Industri Keuangan Syariah: Industri keuangan Syariah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Instrumen-instrumen keuangan seperti sukuk (obligasi syariah) dan produk-produk investasi syariah menjadi pilihan populer bagi investor global. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Syariah mampu bersaing dalam era global.
3. Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Etika: Ekonomi Syariah mengedepankan prinsip-prinsip etika dan moral dalam bisnis dan investasi. Hal ini membantu mendorong perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, yang merupakan komponen penting dari keberlanjutan finansial.
4. Kolaborasi Antar Negara: Di era global, kolaborasi antar negara dalam mengembangkan ekonomi Syariah dapat menjadi faktor penting dalam membangun keberlanjutan finansial. Negara dengan ekonomi Syariah yang kuat dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk memperkuat industri ini secara global.

5. Diversifikasi Portofolio Investasi: Ekonomi Syariah mendorong diversifikasi portofolio investasi dengan fokus pada sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti perbankan, real estat, pertanian, dan teknologi, dapat membantu menurunkan risiko dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
6. Peningkatan Kesadaran Publik: Kesadaran publik tentang keuangan Syariah terus meningkat. Ini menciptakan peluang bagi lembaga keuangan Syariah untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, baik di dalam maupun di luar komunitas Muslim.
7. Pengawasan dan Regulasi: Penting untuk ada pengawasan dan regulasi yang kuat dalam ekonomi Syariah untuk memastikan transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Regulasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat fondasi keberlanjutan finansial.
8. Perkembangan Teknologi: Seperti dalam semua sektor keuangan, teknologi berperan besar dalam perkembangan ekonomi Syariah. Fintech Syariah, blockchain, dan teknologi terkait lainnya dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan Syariah di seluruh dunia.

Kesimpulannya, ekonomi Syariah memiliki potensi besar untuk membangun keberlanjutan finansial di era global, dengan memadukan prinsip-prinsip etika dan moral dalam bisnis dengan instrumen-instrumen keuangan modern. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidakstabilan ekonomi, pendekatan ini dapat menjadi kontributor penting dalam mencapai tujuan keberlanjutan finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- ADBInstitute. 2023. 'Islamic Finance', *Finance Sector*. Available at: <https://www.adb.org/what-we-do/sectors/finance/islamic-finance#:~:text=Islamic%20finance%20provides%20financial%20services,and%20risk%20exposures%20of%20investors>.
- Al-Suwailem, S. 2022. 'Islamic Economics in a Complex World', *Islamic Economics in a Complex World*, 23 February. Available at: <https://feb.ugm.ac.id/en/news/3533-islamic-economics-in-a-complex-world>.
- Al-Suwailem, S. and Doria, F.A. 2019. 'Can a Free Market be Complete?' Available at: <https://independent.academia.edu/SamiAlSuwailem>.
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A. and Levine, R. 2004. 'Finance, Inequality, and Poverty: Cross-Country Evidence'. National Bureau of Economic Research. Available at: <http://www.nber.org/papers/w10979>.
- Dinar Standard. 2020. *State of the Global Islamic Economy Report: Thriving in Uncertainty*, p. 209. Available at: <https://www.institutohalal.com/state-of-global-islamic-economy-report-2020-2021/>.
- Iqbal, M. 2017. 'Development of Islamic Economics and Finance and the Role of International Conferences', *Islamic Economics Journal*, 30, pp. 3–14.
- World Bank. 2007. *Millenium Development Goals: Confronting the Challenges of Gender Equality and Fragile States*. Global Monitoring Report 2007. World Bank.

BIODATA PENULIS



Fida Arumingtyas, S.El.,M.Si

Dosen tetap Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang

Fida Arumingtyas, S.El.,M.Si lahir di Ponorogo tanggal 9 Desember 1987, Mengenyam pendidikan S1 di jurusan Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di ITB Ahmad Dahlan, Jakarta dengan jurusan Keuangan Syariah. Berkarir sebagai dosen tetap Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang hingga sekarang. Selain itu saat ini penulis aktif sebagai wakil sekretaris Perkumpulan Dosen Manajemen Indonesia (PDMI) regional Jabar Banten, dan juga aktif sebagai pengurus divisi Penelitian dan Pengembangan Center for Sustainable Awqaf Studies (CSAS) ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email:fidaarum@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Arief Yanto Rukmana, S.T., M.M., C.Ed., CPBA®
Mahasiswa Doktoral Universitas Pendidikan Indonesia
Dosen Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri Bandung
Dosen Universitas Nurtanio Bandung

Penulis sebelumnya telah memegang posisi penting di sejumlah bisnis yang beroperasi pada skala nasional dan dunia. penulis saat ini berprofesi sebagai praktisi bisnis (Pemilik Perusahaan di Bidang Fashion, Kuliner dan Bisnis Digital juga sebagai seorang akademisi. Penulis mengajar di Universitas Nurtanio Bandung, dan dosen tetap di perguruan tinggi indonesia mandiri (STMIK IM & STIE STAN IM). alumni dari Program Studi Informatika (S1) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK IM), Program Magister Manajemen (S2) di Pasca Sarjana Universitas Widyatama dan sedang melanjutkan studi Pendidikan (S3) Program Doktoral Pendidikan Teknologi dan Vokasional di Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis aktif sebagai pembicara dan narasumber kewirausahaan digital juga berdedikasi sebagai praktisi bisnis / owner / pemilik beberapa perusahaan yang bergerak pada industri food, fashion and fun. serta aktif

dalam organisasi nasional maupun internasional. Penulis juga seorang profesional dalam bidang public speaking & sebagai asesor kompetensi digital dan instruktur berpengalaman untuk sertifikasi kompetensi SKKNI BNSP Digital Marketing, Social Media Marketing dan Metodologi Pelatihan Level III, Graphic Design serta Sertifikasi Kompetensi beberapa lainnya yang diselenggarakan dinas tenaga kerja kota bandung, PT Rice INTI dan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung. Selain itu pula penulis produktif sebagai pendamping UMKM dan pengelola Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri dengan membina dan melatih / coaching, mentoring serta melakukan pendampingan bisnis UMKM / Start UP untuk mahasiswa yang berminat menjadi seorang Entrepreneur / Technopreneurship tangguh yang mampu berdayasaing pada kancah internasional.

BIODATA PENULIS



Dr. Sri Nawatmi, SE., MSi.

Dosen Program Studi Keuangan dan Perbankan
Fakultas Vokasi Universitas Stikubank (Unisbank)

Penulis lahir di Boyolali tanggal 27 April 1967. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Keuangan dan Perbankan, Fakultas Vokasi, Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang sejak tahun 1991. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi, pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan tahun 1991 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Melanjutkan studi S2 pada Jurusan, Fakultas dan Universitas yang sama pada tahun 1998. Pendidikan S3 ditempuh di DIE (Doktor Ilmu Ekonomi) di Universitas Diponegoro Semarang, lulus tahun 2016.

BIODATA PENULIS



Aminah Lubis, ME

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
STAI Barumun Raya Sibuhuan

Penulis Lahir di Pasir Jae 12 Mei 1991. Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Perbankan Syariah, STAI Barumun Raya Sibuhuan. Menyelesaikan i Pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Syariah dan melanjutkan S2 ipada Jurusan Ekonomi Islam. Penulis menekuni bidang Menulis.

BIODATA PENULIS



Alamsyah Agit, SE., M.Si.

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam
DDI Sidenreng Rappang

Penulis di Pangkajene, Sidenreng Rappang, pada tanggal 28 Juni 1996. Penulis menempuh pendidikan sarjana dan berhasil menyelesaikan studi S-1 di prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Parepare pada tahun 2018. Kemudian, penulis menyelesaikan studi S-2 di prodi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Penulis memiliki keahlian di bidang ekonomi pembangunan terutama dalam sub bidang perencanaan pembangunan. Untuk memberikan kontribusi secara ilmiah penulis berkarir sebagai dosen, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain bidang ekonomi pembangunan, penulis juga berkolaborasi dengan dosen dan peneliti lain dalam bidang ekonomi dan bisnis serta *social sciences*, namun bidang yang

sangat diminati oleh penulis adalah bidang ekonomi industri.

E-mail Penulis: alamsyahagit@gmail.com

BIODATA PENULIS



DR. Agung Nusantara, SE., M.Si

Dosen Program Studi S1-Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Semarang

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi-Universitas Brawijaya Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan (1989). Melanjutkan S2 pada jurusan yang sama di Universitas Gadjah Mada (1999) dan S3 Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Diponegoro (2013). Penulis menekuni bidang Teori Ekonomi Mikro – Makro, Statistika, dan Metode Kuantitatif.